Yayasan
Masyarakat dan Perikanan
Indonesia

LAPORAN PELAKSANAAN PERTEMUAN REGULER
KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN (KPBP) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kristal Hotel – Kupang, 12 Juli 2023

Daftar Isi

Pendahuluan 2
Pelaksanaan Kegiatan 2
Peserta 2
Hasil Pertemuan 3
Penutup dan Rencana Kerja 8

Pendahuluan

Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Pelaksanaan Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna Provinsi NTT yang dilakukan sesuai keputusan Gubernur NTT nomor: 167/KEP/HK/2023 tentang Komite Pengelola Bersama Perikanan Provinsi NTT. Pertemuan Reguler kali ini membahas tentang pentingnya pengelolaan bersama perikanan, gambaran umum mitra di daerah, serta penyusunan rencana kerja bersama periode 2023-2025 KPBP NTT yang merupakan sinergitas program pemerintah dan mitra (LSM, Akademisi dan Industri) di Provinsi NTT

Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan Regular Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Provinsi Nusa Tenggara Timur diselenggarakan pada hari Rabu, 12 Juli 2023 bertempat di Hotel Kristal Kupang. Kegiatan ini dilaksanakan secara Hybrid.

Peserta

Pertemuan Regular Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna Provinsi Nusa Tenggara Timur I tahun 2023 diikuti oleh 64 orang peserta, yang terdiri dari 49 orang (13 orang Perempuan dan 33 Laki-laki) yang mengikuti secara langsung dan 15 orang (10 laki-laki dan 5 orang perempuan) mengikuti secara daring. Peserta berasal dari berbagai unsur seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Industri, Nelayan, akademisi, dan LSM.

Hasil Pertemuan

Pembukaan Kegiatan	:	**Pengantar MDPI (Bapak Putra Satria Timur)** - melaporkan terkait rencana aksi KPBP yang telah terlaksana 2021-2022: pengumpulan data sekitar 300 port sampling, validasi data statistik, sosialisasi perijinan kapal perikanan, peningkatan kelembagaan Keputusan Gubernur terkait KPBP yang dulunya merupakan Keputusan Kepala Dinas, Penulisan Karya Ilmiah dengan data IFISH (sedang berproses), dan sosialisasi pendaftaran dan perizinan kapal perikanan (migrasi izin) dilakukan esok hari (13 Juli 2023) - Tujuan yang ingin dicapai : berkontribusi dan berkolaborasi untuk rencana kerja KPBP Provinsi NTT 2 tahun kedepan **Sambutan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi NTT/Ketua KPBP Provinsi NTT, Ir. Agustinus Bulu** - Dalam pelaksanaan rencana aksi/kerja KPBP kedepan, diperlukan lebih banyak dukungan dalam bentuk pelaksanaan Bimtek baik SKN maupun CPIB - Tantangan saat ini yang dihadapi oleh pelaku usaha khususnya terkait kapal perikanan, yaitu peralihan perizinan dikarenakan UUCK beserta turunannya. Hal ini sangat diperlukan sosialisasi secara langsung di Pelabuhan Perikanan terkait peralihan izin ini, tidak melalui online, dan oleh orang yang kompeten. - Terkait Bimtek SKN, DJPT-KKP dapat dapat menggunakan anggaran sendiri untuk perjalanan/kebutuhan mereka sendiri. Mitra/pemda hanya menyediakan untuk kebutuhan lainnya/ peserta - PKS terkait nelayan andon dengan beberapa provinsi belum diperpanjang karena perlu MoU antar Gubernur memiliki masa berlaku sudah habis. Oleh karena itu, masih menunggu MoU antar Gubernur terlebih dahulu, kemudian PKS bisa dilakukan - Saat ini Petugas statistic perikanan tangkap di Provinsi NTT ada 66 orang. Harapannya dapat mendukung peningkatan kualitas data statistic perikanan tangkap di Provinsi NTT
Presentasi dan Diskusi Sesi I, disampaikan oleh bapak Ir. Agustinus Bulu	:	**Kebijakan Pengembangan Perikanan Tuna dalam Mendukung Kebangkitan Ekonomi oleh Ketua KPBP Provinsi NTT** - Peralihan perizinan masih terkendalan karena SIMKADA di daerah juga belum siap

		- Kesiapan daerah mengaplikasi perizinan OSS, belum didukung perangkat. - Proses migrasi menyulitkan, karena belum pelaku dan pemerintah belum siap - Kepastian investasi (Andi, KCD Folitm); dulu TDKP sampai 10 GT, sekarang 5 GT. Saat ini ada migrasi lanjutan dimana SIUP SUPI untuk kapal 6 GT keatas - Informasi yang kami terima saat ini untuk transmitter paling murah seharga 15 juta, dengan iuran tahunan 5 juta. Ini cukup mahal untuk kapal diatas 5 GT - Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sikka menyampaikan bahwa dalam keputusan Gubernur terkait KPBP Provinsi NTT, kalua bisa mengakomodir seluruh kabupaten di Provinsi NTT - Migrasi izin perlu disampaikan dengan baik kepada pelaku usaha terkait persyaratan dan tata caranya - Dalam rangka mendukung pelaksanaan rencana kerja KPBP, pada saat penyusunan anggaran di Pusat, dapat diajukan ke dalam dana Dekonsentrasi - Di Alor ada 46 kapal penangkap tuna dari Sulawesi Selatan. Permasalahan saat ini, PKS andon dan sulsel sudah habis. Khawatirnya, ini akan digunakan oknum tertentu untuk tetap melayani andon sebagai pemasukan illegal. Perlu segera memperpanjang PKS - Alor memiliki 2 WPP yaitu 573 dan 714. 714 disipakan untuk lumbung SDI (bukan area penangkapan). Dari 110 desa di Alor, terdapat 103 desa pesisir. Kapal yang boleh beroperasi di Kawasan konservasi, adalah kapal sampai dengan 5 GT. Perlu ada pengawasan ketat, karena tuna loin yang keluar lebih dari 15 titik. - Rumpon di alor ada tiap 100 meter. Perlu pengawasan dan sosialisasi lebih baik - Akses izin baru melalui SIMKADA tidak bisa dilakukan - Cakupan pendataan perlu lebih merata, jika memungkinkan dapat menjangkau PP Tenau. - Revisi keanggotaan KPBP (Primo Indo ganti Pahala Bahari Nusantara) - Migrasi didasarkan oleh edaran Menteri ke seluruh gubernur di Indonesia. Migrasi izin sudah disampaikan kepada pengusaha, namun pemerintah daerah tidak bisa memaksa pengusaha - Andon Provinsi Sulawesi Selatan dan NTT, masih diupayakan. Rencananya kedepan, seluruh hasil tangkapan akan dipungut SKAI. Baik dikirim ataupun tidak. Masih dalam tahap pembahasan di Biro hukum - Perlu ada perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Timor Leste, agar nelayan NTT bisa masuk/memancing ikan di daerah

		Timor Leste - Tanggapan Pak Hilmar (Perwakilan industri nelayan): Perijinan kapal (migrasi) dikelurkan oleh edaran mentri yang membatasi daerah penangkapan berpengaruh pada hasil tangkapan (kapal 5-30 GT). Dimana kapal ukuran tersebut memiliki area penangkapan <12 mil, dan kadang >12 mil. - Tanggapan Pak Andy KCD Flotim : terkait kepastian iklim investasi (kasus : menerbitkan TDKP >5GT , adanya moratorium yang dialihkan ke perijinan SIUP dan SIPI , Migrasi Perijinan : masalah pengawasan , biaya operasional 20 juta
Presentasi oleh Direktorat PSDI, Aris Budiarto **Ketua Pokja Analisis Pengelolaan SDI**		**Pentingnya Pengelolaan Bersama Perikanan dan Sinergi Program Kelembagaan Ditingkat Pusat dan Daerah, Melalui LPP WPPNRI dan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Provinsi NTT** - Co-Management ditingkat pusat dilakukan melalui Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPP. Dimana pertemuan LPP WPP, menghasilkan rencana aksi - Agar dapat diakomodir dan didukung oleh LPPWPP, Rekomendasi /rumusan dari pertemuan Reguler KPBP dapat disampaikan ke ketua LPP WPP 573 dan 713 - Untuk dapat memperkuat kelembagaan KPBP/KPBP menjadi bagian dari LPP WPP, KPBP melalui DKP Provinsi NTT dapat mengeluarkan surat resmi ke Dirjen Perikanan Tangkap, cc Koordinator masing-masing WPP - Dukungan pelaksanaan rencana kasi KPBP, dapat dilakukan melalui mekanisme dana Dekon saat pembahasan RKKL dengan ToR dan RAB kegiatan - Kalau bisa ada pokja masing-masing sesuai dengan turunan LPPWPP - Saat ini, UU pembagian terkaitpembagian penghasilan PNBP, dimana 80% akan di transfer ke daerah, 20% pusat sedang berproses. Tahun ini rencana akan release/terbit - Perlu ada perizinan rumpon di NTT, setidaknya 1 rumpon teregister. Jika ada kendala persyaratan yang sulit, dapat dibuatkan list daftar kendala proses persyaratan PKKPRL dan disampaikan langsung ke Dit PRL maupun DJPT (sifatnya membantu). Karena bangunan menetap >30 hari harus izin tata ruang laut (seperti Rumpon)

Panel Diskusi **1. MDPI (Amrollah)**		**Hasil Kegiatan Port Sampling Data Pada Perikanan Handline Tuna di PPI Oeba, Kota Kupang, NTT Tahun 2023** - Beberapa kegiatan MDPI yang dilakukan di Provinsi NTT yaitu pengumpulan data sampling, pemasangan vessel tracker, mendukung rencana aksi KPBP Provinsi NTT seperti validasi data statistic Perikanan Tangkap, Sosialisasi Perizinan kapal, dll. - Berdasarkan data frekuensi Panjang jenis tuna sirip kuning tahun 2018-2022, terlihat bahwa ukuran <100 cm lebih banyak tertangkap (86,53%) dibandingkan ukuran dewasa >100 cm (13,47%). - Sedangkan jenis albakor, dari data terlihat ukuran dewasa (>80 cm) tertangkap 100% (data 2018-2022). Sampai saat ini belum pernah terdata ikan jenis albakor tertangkap dengan ukuran <80cm - Berdasarkan data hasil pemasangan tracking system, terlohat bahwa masih ada nelayan yang melaut di derah Timor Leste - Selain pengumpulan data, MDPI juga membantu dalam mendukung *legal fisheries* melalui pendaftaran izin pemasangan rumpon, salah satu contoh di Maluku Utara, Kab. Halmahera Selatan, Desa Madopolo. Tantangannya yaiti persyaratan untuk memperoleh PKKPRL yang cukup sulit bahkan berbayar, dan tindaklanjut yang cukup lama dari OSS. Sehingga memakan waktu sekitar 7 bulan dalam pengurusannya
2. AP2HI, Kosmas		**Update prinsip terbaru program perbaikan perikanan (FIP) berupa aspek HAM, sosial dan perkembangan permintaan pasar global serta upaya private sector (asosiasi) memenuhi kebutuhan tersebut.** - Di NTT terdapat 8 perusahaan member AP2HI - Ada 1 tambahan standar baru dari FIP, yaitu Aspek Sosial yang harus dipenuhi. Seperti; memberikan & menghormati kebebasan awak kapal dalam berkelompok dan berasosiasi, pendapatan dan keuntungan yang layak, terbuka dan stabil, lingkungan kerja aman memiliki perlengkapan medis yang memadai, standar hidup yang layak di atas kapal, waktu istirahat yang layak untuk semua awak kapal tanpa terkecuali, memahami penanganan sampah di atas kapal, memahami peraturan dan menghormati hak wilayah jika beroperasi di dalam atau dekat wilayah adat, memiliki perjanjian kerja laut, memiliki akses untuk mekanisme penyampaian keluhan yang efektif dan rahasia - Trend permintaan pasar global antara lain yaitu perusahaan menjalankan FIP, Traceability dan sertifikasi produk perikanan - AP2HI rencana akan melakukan perluasan MSC 2nd Tranche untuk perikanan Pole and Line di WPP 713 dan 714 untuk perairan

		West dan East Flores.
3. **WWF, Haries Sukandar.**		**Program Perikanan Tangkap Yayasan WWF Indonesia** - WWF Indonesia untuk provinsi NTT saat ini fokus pada Kawasan Konservasi, fasilitasi pas kecil dan TDKP, pengumpulan data perikanan dan sustainable livelihood - Di Alor ada forum Kolaborasi terkait sustainable livelihood - Dalam mendukung pengelolaan Bersama perikanan di NTT, WWF siap berkontribusi dalam mendukung rencana kerja KPBP sesuai lokus kerja WWF di Provinsi NTT
4. **PT. Sahabat Laut Lestari (SLL). Andini**		**Dukungan Program Pengelolaan Perikanan Gurita di Provinsi NTT** - PT. SLL memiliki 3 fokus kerja, yaitu pembuatan teknologi Traceability (Tracetales), Fisheries and Community untuk mendukung industry perikanan dalam menjalankan FIP, dan Perahu Data yaitu pengembangan aplikasi untuk mengumpulkan data perikanan - Saat ini, PT. SLL melakukan kegiatan pendampingan nelayan dan pengumpulan data perikanan Gurita di Kabupaten Sikka, yang merupakan bagian dari Fishery Improvement Program (FIP) - Selain melakukan pendampingan nelayan dan pengumpulan data, PT. SLL juga melakukan pendaftaran KUSUKA, BPJS dan dokumen kapal untuk nelayan - Adapun beberapa tantangan yang dihadapi saat ini yaitu persepsi terkait sampan yang digunakan oleh nelayan dalam menangkap Gurita yang berukuran sangat kecil, menurut standar FIP harus di registrasi. Sedangkan otoritas setempat menyatakan tidak. Hal ini perlu ditindaklanjuti Bersama
5. **Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Ovan**		**Pendataan Perikanan Tuna Provinsi NTT tahun 2019-2023** - Pengumpulan data oleh YKAN dilakukan dengan *metode Crew-Operated Data Recording System* (CODRS), dilakukan dengan memberikan kamera kepada nelayan, kemudian hasil tangkapan difoto oleh nelayan. Nelayan akan mendapatkan insentif dari YKAN dari data yang dikumpulkan per bulannya - YKAN telah bekerja di Wilayah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai tahun 2019 - Mitra pada tahun 2019 sebanyak 9 kapal - Tahun 2020-2021 Kapal mitra sejumlah sebanyak 19 kapal - Dan Tahun 2022, Kapal mitra sejumlah 8 kapal - Data dikumpulkan untuk mendukung penyusunan Harvest Strategy Tuna di WPP 713, 714 dan 715

		- Penyerahan data ke tim sains *Harvest Strategy* Tuna dan eBRPL

Link Penting (Materi, Absensi, Dokumentasi) selengkapnya:
https://drive.google.com/drive/folders/1Iz2AtB85VMoVd1WNG0TjawnNBXLyavm6

Dokumentasi;

Panel Diskusi 1. Agustinus Bulu (paling kiri) Bersama penanggap

Panel Diskusi 2, mitra NGO dan Asosiasi

Penyusunan Rencana Kerja

Agustinus Bulu saat menyampaikan materi

Penutup dan Rencana Kerja

- Pada sesi terakhir, dilakukan pembagian kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Kerja KPBP Tuna periode 2023-2025
- Adapun kelompok kerja tersebut yaitu Kelompok perikanan Tuna, Gurita, dan Kawasan Konservasi
- Pembagian kelompok ini didasarkan pada prioritas KPBP dimana Perikanan Tuna dan Gurita, merupakan komoditi unggulan, dan Kawasan Konservasi, merupakan ekosistem yang perlu dijaga dan ditingkatkan dalam menunjang keberlanjutan Sumberdaya Ikan
- Adapun hasil dari penyusunan rencana kerja, dapat dilihat pada halaman berikutnya.

Rencana Kerja Kelompok Tuna

No	Rekomendasi Rencana Kerja	Rencana aksi	Target	Pelaksana	Lokasi kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Keterangan/Status
1	Perizinan Rumpon,	1. Pendaftaran rumpon 2. Perizianan rumpon dari pemerintah dan pelaku usaha	1. Data rumpon di semua KCD 2. Rumpon mendapatkan SIPR	1. Nelayan, KCD/DKP Prov. NTT, KUPP/KSOP, MDPI dan AP2HI, YKAN	- 7 Wilayah KCD KP Provinsi NTT	2023-2025	
2	Penguatan Pengumpulan data Perikanan	1. Mengumpulkan data beberapa Sampel kapal untuk di ambil data biologinya yang memilki legalitas yang lengkap 2. Observer Deployment untuk kapal PL di Maumere dan Larantuka (AP2HI)	Terkumpulnya data biologi dari beberapa kapal	1. MDPI, AP2HI, YKAN, WWF, AKADEMISI UNKRIS, MUHAMMADIYAH	SIKKA, LARANTUKA, KUPANG, ALOR,	2023-2025	
3	Penerbitan Legalitas (ijin)	Untuk kebutuhan ijin kapal handline maumere dan Larantuka	1. Target pas Kecil dan TDKP 2. Buku Kapal Perikanan	AP2HI, KSOP, KCD LARANTUKA, MDPI,YKAN	1. Sikka 2. Flores Timur 3. ALOR 4. Kota Kupang	Bertahap mulai dari 2023	Usulan ada gerai semua nelayan kecil berupa pas kecil dan TDKP
4	Peningkatan SDM dan Perlindungan Nelayan	Sosialisasi danPelatihan dan sertifikasi SKN,	1. SKN 2. Sertifikat CPIB Kapal	Nelayan, KCD/DKP Prov. NTT, DKP Kab.Kupang,	1. Sikka 2. Flores Timur 3. ALOR	2023-2025	

		SKPI, CPIB dan Asuransi Nelayan	3. Sertifikasi CPIB ABK Kapal 4. Kartu Asuransi Nelayan	KUPP/KSOP, MDPI Penyuluh Perikanan dan AP2HI, YKAN, PPI.OEBA, PPI.TENAU	4. Kota Kupang		
	Implementasi teknologi Ketertelusuran/Monitoring	1. Pemasangan Vessel Tracking Device pada kapal-kapal HL 2. Penyediaan informasi kapal perikanan HL dan PL online melalui portal.ap2hi.org	1. Data alur penangkapan ikan nelayan HL untuk ketelusuran dan monitoring 2. Data kapal PL dan HL tersedia secara online dan dapat diakses terbuka oleh publik	MDPI, AP2HI, YKAN, WWF	1. Sikka 2. Flores Timur 3. ALOR 4. Kota Kupang	2023-2025	
	Penguatan akses pasar	Perluasan sertifikasi MSC 2nd Tranche untuk menambahkan alat tangkap HL	Alat tangkap HL masuk dalam sertifikasi MSC Fishery 2nd Tranche	AP2HI, MDPI, KKP, DKP Prov. NTT	1. Maumere 2. Larantuka	2023-2024	
	Pelaksanaan aspek HAM dan Tanggungjawab sosial pada AKP dan nelayan	Penyadartahuan awak kapal perikanan/nelayan terkait aspek HAM dan tanggungjawab sosial	Meningkatkan komitmen dan pemahaman awak kapal perikanan/nelayan terkait aspek HAM dan Tanggungjawab sosial	AP2HI, MDPI, DKP Prov. NTT	1. Maumere 2. Larantuka 3. Kupang	2023-2024	

Rencana Kerja Kelompok Gurita

No	Rekomendasi Rencana Kerja	Rencana aksi	Target	Pelaksana	Lokasi kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Keterangan/Status
1	Penguatan Pengumpulan data Perikanan	- Mengumpulkan data port sampling di supplier - Mengumpulkan data poduksi	Terkumpulnya data biologi dari beberapa supplier dan data produksi dari logbook nelayan	SLL, Nelayan KCD Flotim DKP Kab Sikka	- Kab Sikka	2023-2025	
2	Perizinan / pendaftaran sampan tanpa mesin	- Mengelurkan surat keterangan dari DKP Prov - Bersurat ke KSOP - Konsultasi dengan DKP Provinsi	Keluarnya surat keterangan tanda sampan, baik dari DKP Prov, KSOP atau Kemenhub	SLL MDPI DKP Prov NTT KSOP	Kab Sikka	2023-2024	
3	Registrasi/Kejelasan Alat Tangkap	Membuat profil alat tangkap gurita dan mencocokkan sesuai UU yang ada terkait konstruksi	Tersedianya profile alat tangkap gurita	SLL MDPI Perguruan Tinggi	Kab Sikka	2024	
4	Peningkatan SDM dan Perlindungan Nelayan	Sosialisasi dan Pelatihan dan sertifikasi - SKN, - CPIB (nelayan, kapal dan supplier) - Kusuka Korporasi	- SKN, - CPIB (nelayan, kapal dan supplier) - Kusuka Korporasi	Nelayan, KCD/DKP Prov. NTT, DKP Kab.Kupang, KUPP/KSOP, MDPI Penyuluh Perikanan	Kab Sikka	2023-2025	
	Konsultasi Tanggungjawab sosial nelayan	Penyadartahuan awak kapal perikanan/nelayan	Meningkatkan komitmen dan pemahaman awak	SLL, DKP Prov. NTT	Kab Sikka	2023-2024	

		terkait aspek HAM dan tanggungjawab sosial	kapal perikanan/nelayan terkait aspek HAM dan Tanggung jawab sosial				
	Produk Olahan Turunan	Perluasan produk turunan dari Gurita memanfaatkan gurita reject yang kurang memiliki nilai	Tersedianya produk olahan turunan untuk gurita Tersedianya pasar menengah keatas untuk produk tersebut	SLL, Penyuluh Perikanan Perguruan Tinggi	Kab. Sikka	2023-2025	

Rencana Kerja Kelompok Konservasi

No	Rekomendasi Rencana Kerja	Rencana aksi	Target	Pelaksana	Lokasi kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Keterangan/Status
1	Penguatan Kelembagaan	1. Rencana Zonasi dan Satuan Unit organisasi Pengelola (SUOP) 2. UPT menuju BLUD 3. Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi 4. Sosialisasi KK 5. Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Masyarakat 6. Monitoring dan Pendataan Biofisik target Konservasi dan Sosek 7. Pengawasan dan Pemantauan 8. EAFM di NTT	1. Terbentuknya SUOP di Kawasan Konservasi (KK) Ende, Maubesi, Batu Gede 2. - Terbentuknya UPT Balai Pengelolaan KK - Terbentuknya BLUD di KK Daerah 3. Tersedianya dokumen Rencana Pengelolaan (RP) pada KKD 4. Tersosialisasinya KK melalui kegiatan KCD mengajar dan turun desa 5. – Pembangunan pusat informasi 6. Adanya data series tahunan 7. Patroli terpadu, pengawasan berbasis	1. DKP, KCD, BPSPL 2. DKP NTT, KKP dan Kemendagri 3. SUOP KK Alor, FLotim, WWF, BPSPL Denpasar, Pemda/Pemkab, MDPI 4. SUOP, WWF, TAKA, TSI, Untrip, BKKPN Kupang 5. BNSP, SUOP, WWF, MDPI, KKP 6. SUOP, WWF, TAKA, TSI, MDPI, BKKPN Kupang, BPSPL Denpasar, BKSDA 7. SUOP, DKP, Pokmaswas, PSDKP, Pol PP, TNI AL, Airud	1. Ende, Maubesi, Batu Gede 2. 7 UPT – 2 BLUD 3. Alor dan Flotim, Lembata, Sikka 4. Alor, Flotim, Lembata, Sikka, Rotte, Kab Kupang, Sabu, Sumba Timur, dam Barat daya, Manggarai Barat 5. Idem 4 6. Idem 4 7. Idem 4	2023-2025	Poin 1-8 saat ini sedang berproses/dikelola Optimum, dan butuh penguatan

			masyarakat dilakukan 1 kali/bulan 8. Restrukturisasi dan Pembentukan Pokmaswas				
2	EAFM di NTT	1. Pengumpulan data perikanan (Biologi dan SOsek) 2. Capacity Building	Peningkatan Skor EAFM dari tahun 2021	DKP NTT, WWF, LC EAFM, SLL.	8. Alor, Flotim, Lembata, Sikka, Rotte, Kab Kupang, Sabu, Sumba Timur, dam Barat daya, Manggarai Barat	2023-2025	

Yayasan
Masyarakat dan Perikanan
Indonesia
Jalan Bypass Ngurah Rai, Ruko Istana Regency Blok S 6 No 7
Pesanggaran, Denpasar 80223, Bali - Indonesia
Phone: (+62 361) 471 9020 | E-mail: info@mdpi.or.id
Website: www.mdpi.or.id

Ver: 1.1/09.02.23

DAFTAR HADIR / ATTENDANCE LIST

TANGGAL & TEMPAT / DATE & VENUE : Kristal Hotel Kupang, 12 Juli 2023

NAMA KEGIATAN / EVENT : Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) prov. NTT.

Dengan menandatangani daftar hadir di bawah, Saya memberikan hak kepada Yayasan MDPI untuk mengungkap, mengedit, menggunakan dan menggunakan ulang informasi berupa gambar, suara dan nama saya untuk kepentingan pers di setiap dan semua jenis publikasi multi-media, dalam format cetak maupun digital termasuk namun tidak terbatas pada: fotografi, video, rekaman audio, artikel online, siaran berita, publikasi umum lainnya. Dengan ini saya melepaskan hak untuk memeriksa ataupun menyetujui hasil akhir produk, di mana jenis informasi di atas kemungkinan muncul. Saya memahami bahwa tidak ada kompensasi khusus yang akan diberikan kepada saya untuk penggunaan informasi tersebut dan ada kemungkinan di mana saya tidak mendapatkan pemberitahuan awal saat informasi tersebut akan digunakan.

No	Nama/Name	Jenis Kelamin /Gender	Telepon/Phone Number	Email	Institusi/Organization	Tanda Tangan/Signature
✓ 1	A. Andy Amontoda	L	081352383077		KCD 04	[signature]
2	Andini Kusuma	P	081138004783		SLL	[signature]
✓ 3.	Paulus H. Bangkur	L	081317402250		Dinas Perikanan Kab. Sikka	[signature]
4	Oran Santoro	L	081236324590		YKAN	[signature]
5.	Amollah	L			MDPI	[signature]
✓ 6.	Hilmar. D. U.	L	082237673300	hilmar.dayan@gmail.com	HNPSIL Flohm Koordinator	[signature]
✓ 7	Orison S. Kefi	L	081244289290	orison.kefi89@gmail.com	PPI Oeba	[signature]
8	ANITA MOLES	P	081270196[illegible]	anitamossy@gmail.com	KCD-Alor	[signature]
9	HARIES SUKANDAR	L	081210180515	hsukandar@wwf.id	WWF-ID	[signature]
✓ 10	Yoset Mare	L	081246153 29	yomar186315@gmail.com	DKP Prov. NTT	[signature]

Yayasan
Masyarakat dan Perikanan
Indonesia
Jalan Bypass Ngurah Rai, Ruko Istana Regency Blok S 6 No. 7
Peunggaran, Denpasar 80223, Bali - Indonesia
Phone (+62 361) 471 9020 | E-mail: info@mdpi.or.id
Website: www.mdpi.or.id

Ver: 1.1/09.02.23

DAFTAR HADIR / ATTENDANCE LIST

TANGGAL & TEMPAT / DATE & VENUE : Kristal Hotel Kupang, 12 juli 2023

NAMA KEGIATAN / EVENT : Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Prov. NTT.

Dengan menandatangani daftar hadir di bawah, Saya memberikan hak kepada Yayasan MDPI untuk mengungkap, mengedit, menggunakan dan menggunakan ulang informasi berupa gambar, suara dan nama saya untuk kepentingan pers di setiap dan semua jenis publikasi multi-media, dalam format cetak maupun digital termasuk namun tidak terbatas pada: fotografi, video, rekaman audio, artikel online, siaran berita, publikasi umum lainnya. Dengan ini saya melepaskan hak untuk memeriksa ataupun menyetujui hasil akhir produk, di mana jenis informasi di atas kemungkinan muncul. Saya memahami bahwa tidak ada kompensasi khusus yang akan diberikan kepada saya untuk penggunaan informasi tersebut dan ada kemungkinan di mana saya tidak mendapatkan pemberitahuan awal saat informasi tersebut akan digunakan.

No	Nama/Name	Jenis Kelamin /Gender	Telepon/Phone Number	Email	Institusi/Organization	Tanda Tangan/Signature
11	Fauzan Hidayat	L	081320222125	fauzan.hidayat@kkp.go.id	PSDKP Kupang	
12	Agusting Ermawati	P	0811893313	Agusting.parihin@gmail.com	BKKPN Kupang	
13	Trisnawati	P	081237607663	cwc_kp@yahoo.com	PT. Era Mandiri Cemerlang	
14	Agustinus J.J.H Amaheka	L	081 79182 278.		KCD 01	
15	Mery S. Ola	P	081 312 901 649		KCD 01	
16	A. Riza Baroq.	L	081138638 48.		MDPI	
17	Wilhelmus Colong	L	085263788206.	~~Dkp~~	DKP NTT.	
18	Yohanis Pandie (Yohanis Pandie	L	081 239429 182	081239429 182.	Dkp. Prov. NTT	
19	Samuel U. Limu	L	085732049728		Perwakilan PT. ASK	
20	Adrianus Dagang	L	082399050 8	Dea_dagang@yahoo.com	DKP NTT	

Yayasan
Masyarakat dan Perikanan
Indonesia
Jalan Bypass Ngurah Rai, Ruko Istana Regency Blok S 6 No 7
Pesanggaran, Denpasar 80223, Bali - Indonesia
Phone: (+62 361) 471 9020 | E-mail: info@mdpi.or.id
Website: www.mdpi.or.id

Ver: 1.1/09.02.23

DAFTAR HADIR / ATTENDANCE LIST

TANGGAL & TEMPAT / DATE & VENUE : Kristal Hotel Kupang, 12 Juli 2023

NAMA KEGIATAN / EVENT : Pertemuan Regular Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) prov. NTT.

Dengan menandatangani daftar hadir di bawah, Saya memberikan hak kepada Yayasan MDPI untuk mengungkap, mengedit, menggunakan dan menggunakan ulang informasi berupa gambar, suara dan nama saya untuk kepentingan pers di setiap dan semua jenis publikasi multi-media, dalam format cetak maupun digital termasuk namun tidak terbatas pada: fotografi, video, rekaman audio, artikel online, siaran berita, publikasi umum lainnya. Dengan ini saya melepaskan hak untuk memeriksa ataupun menyetujui hasil akhir produk, di mana jenis informasi di atas kemungkinan muncul. Saya memahami bahwa tidak ada kompensasi khusus yang akan diberikan kepada saya untuk penggunaan informasi tersebut dan ada kemungkinan di mana saya tidak mendapatkan pemberitahuan awal saat informasi tersebut akan digunakan.

No	Nama/Name	Jenis Kelamin /Gender	Telepon/Phone Number	Email	Institusi/Organization	Tanda Tangan/Signature
21	Martinus Nange	L	081236 872904		Nelayan oeba	[signature]
22	Anwar	L	085330318883		Nelayan Th oeba	[signature]
23	Rustam	L	081342427229		NELYAN OBAK EMC	[signature]
24	DEFKETIS G HUNOKAS, SPI	L	081239524116		PENYULUH KAB KUPANG	[signature]
25	ESRA	L	081 291 451 012		CV. IMMANUEL	[signature]
26	RANDI	L	081 239 752 385		PT JALA SEMBLAN	[signature]
27	ITA INDRIANA	P	081353941255		DINAS PERIKANAN KOTA KUPANG	[signature]
28	STELDY PONO	L	082236663740		PENYULUH KOTA KUPANG	[signature]
29	MUH. SALEH GORU	L	081236991111		KCDKP WILKAB ALOR	[signature]
30	Merry Foenay	P	0812 4644 4449			[signature]

Yayasan
Masyarakat dan Perikanan
Indonesia

Ver: 1.1/09.02.23

DAFTAR HADIR / ATTENDANCE LIST

TANGGAL & TEMPAT / DATE & VENUE : Kristal Hotel Kupang, 12 Juli 2023

NAMA KEGIATAN / EVENT : Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama perikanan (KPBP) prov NTT.

Dengan menandatangani daftar hadir di bawah, Saya memberikan hak kepada Yayasan MDPI untuk mengungkap, mengedit, menggunakan dan menggunakan ulang informasi berupa gambar, suara dan nama saya untuk kepentingan pers di setiap dan semua jenis publikasi multi-media, dalam format cetak maupun digital termasuk namun tidak terbatas pada: fotografi, video, rekaman audio, artikel online, siaran berita, publikasi umum lainnya. Dengan ini saya melepaskan hak untuk memeriksa ataupun menyetujui hasil akhir produk, di mana jenis informasi di atas kemungkinan muncul. Saya memahami bahwa tidak ada kompensasi khusus yang akan diberikan kepada saya untuk penggunaan informasi tersebut dan ada kemungkinan di mana saya tidak mendapatkan pemberitahuan awal saat informasi tersebut akan digunakan.

No	Nama/Name	Jenis Kelamin /Gender	Telepon/Phone Number	Email	Institusi/Organization	Tanda Tangan/Signature
✓ 31	SINTUS. FALLO	L	081231933888		DKP prov	
32	Syukur Achis	L			POKJA KPC	
✓ 33	Denny Bengen	L	081916343636		Kasop KPS	
✓ 34	MOLANDOI Y. AOUTAE	L	085333 000911		DKP prov NTT	
✓ 35	Lasmi	P	082144708851	lasmiperikanan92@gmail.com	Univ. Muhammadiyah	
✓ 36	Lady Cindy Soeltarlan	P	085237032489	lady.cindy@gmail.com	Univ. Nusa Cendana	
✓ 37	Imanuel Lulu	L	082144012736	lulu@yahoo.com	PT ASR (nelayan)	
✓ 38	Yoyos Thelik	L	081339216651		Kepala PPP Kupang	
✓ 39	Robinson R. L.	L	081329043325	UD TUNAS HARAPAN	UD. TUNAS HARAPAN.	
✓ 40	Agustinus Lulu	L	085239411111		Kabid Tangkap prov NTT	

Yayasan
Masyarakat dan Perikanan
Indonesia
Jalan Bypass Ngurah Rai, Ruko Istana Regency Blok S.6 No 7
Pesanggaran, Denpasar 80223, Bali - Indonesia
Phone: (+62 361) 471 9020 | E-mail: info@mdpi.or.id
Website: www.mdpi.or.id

Ver: 1.1/09.02.23

DAFTAR HADIR / ATTENDANCE LIST

TANGGAL & TEMPAT / DATE & VENUE : 12 Juli 2023, Kristal Hotel Kupang.

NAMA KEGIATAN / EVENT : Pertemuan Regular Komita Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Prov NTT.

Dengan menandatangani daftar hadir di bawah, Saya memberikan hak kepada Yayasan MDPI untuk mengungkap, mengedit, menggunakan dan menggunakan ulang informasi berupa gambar, suara dan nama saya untuk kepentingan pers di setiap dan semua jenis publikasi multi-media, dalam format cetak maupun digital termasuk namun tidak terbatas pada: fotografi, video, rekaman audio, artikel online, siaran berita, publikasi umum lainnya. Dengan ini saya melepaskan hak untuk memeriksa ataupun menyetujui hasil akhir produk, di mana jenis informasi di atas kemungkinan muncul. Saya memahami bahwa tidak ada kompensasi khusus yang akan diberikan kepada saya untuk penggunaan informasi tersebut dan ada kemungkinan di mana saya tidak mendapatkan pemberitahuan awal saat informasi tersebut akan digunakan.

No	Nama/Name	Jenis Kelamin /Gender	Telepon/Phone Number	Email	Institusi/Organization	Tanda Tangan/Signature
41.	Yulianto. Beeh	L	0852 391 31498	beehyanto37@gmail.com	Dinas Perikanan Kab Kupang	[signature]
42	Maria Ali Asang	P	081 238 385 584	mariaaliasang@gmail.com	DKP. Prov. NTT	[signature]
43	Jeni. S. Ndun	P	082247492406	Jenindun27@gmail.com	Dkp. Prov. NTT	[signature]
44	IWAN	L	082 305 735 443	iwanmaking@gmail.com	DKP. NT. NTT	[signature]
45	Vence Dethu	C	0821 88897230		DKP NTT (Genau)	[signature]
46	Novita A. Wulandari	P	082395799839		MDPI	[signature]
47	Beatrix M. Rehatta	P			Universitas Kristen Artha Wacana	[signature]
48	Saldi Gantur	L			MDPI	[signature]
49	Satria Putra Timur	L			MDPI	[signature]
50.						

Disampaikan dalam Pertemuan KPBP Tuna Provinsi NTT
Hotel Kristal Kupang, 12 Juli 2023

Hasil Kegiatan Port Sampling Data Pada Perikanan Handline Tuna di PPI Oeba, Kota Kupang, NTT Tahun 2023

Oleh MDPI:

Putra Satria Timur – Fisheries Lead

Amrollah – Site Leader NTT

Saldi Guntur – Field Staff Kupang

Lokasi Kegiatan MDPI 2022

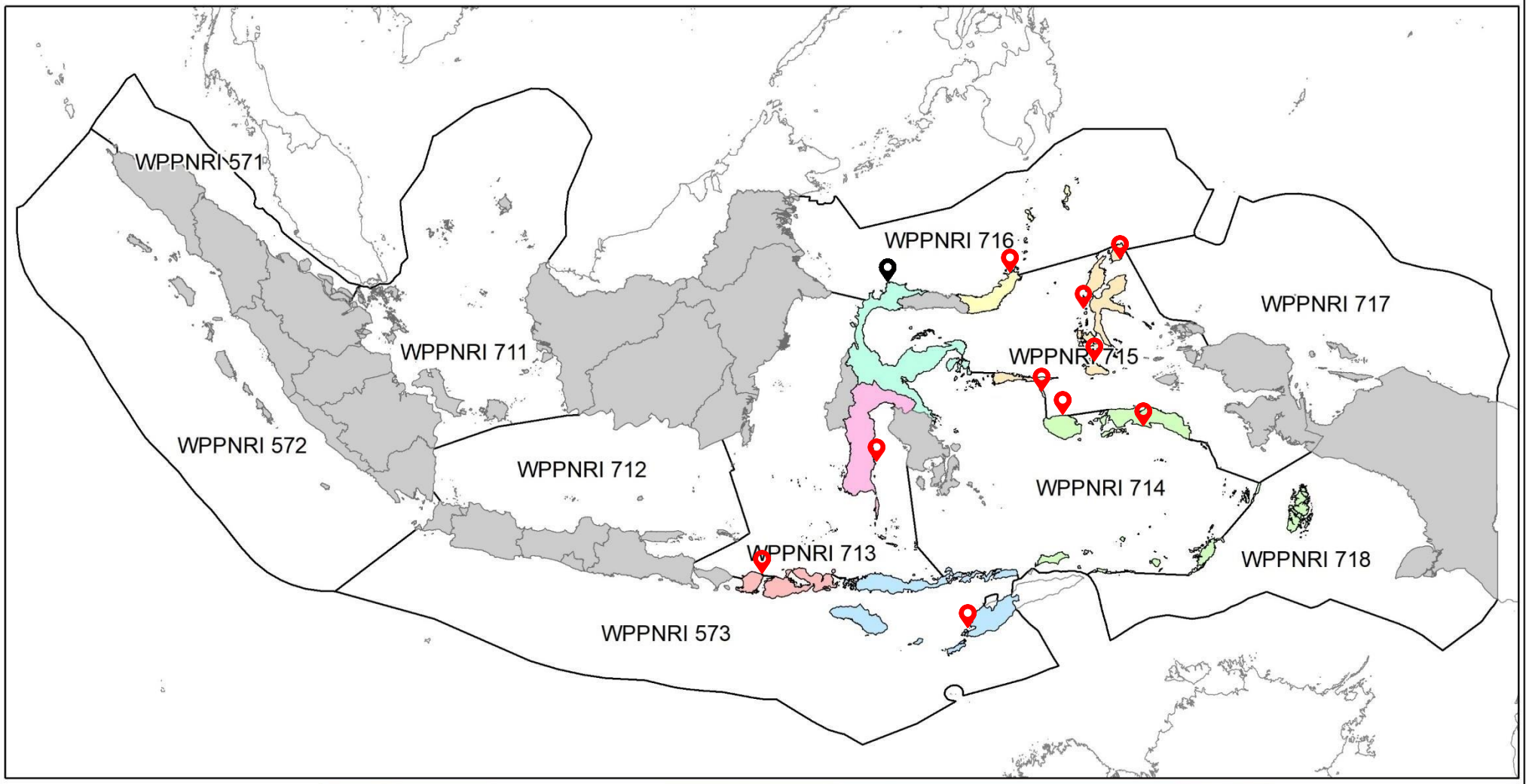

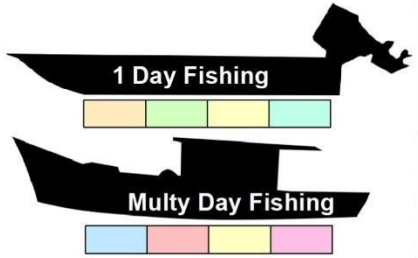

Prov. NTT
Kota Kupang:
- PPI Oeba

Prov. NTB
Kab. Lombok Timur
PPI Labuhan Lombok

Prov. SULUT
Kota Manado
- Pasar bersehati
Kab. Minahasa Utara
- Minaesa

Prov. SULTENG
Kab. Tolitoli:
- Salumpaga

Prov. SULSEL
Kab. Bone:
- Lapacee
- Lonrae
- Tipulue
- Cumpae

Prov. Maluku Utara
Kab. Pulau Morotai :
- Daeo
- Sangowo

Kota Ternate :
- Kmp. Makasar Timur
- Jambula

Kab. Sula:
- Desa Bajo

Kab. Halmahera Selatan
- Madapolo Timur
- Madapolo Barat
- Waringi, Bahu

Prov. Maluku
Kab. Buru :
- Waplau
- Waelihang
- Waprea
- Wamlana
- Waepure
- Tj. Karang
- Tl. Bara

Kab. Maluku Tengah :
- Liang
- Rutah
- Yainuelo
- Tamilow
- Haya
- Tehoru
- Teluti
- Wahai

DUKUNGAN MDPI
KESEPAKATAN BERSAMA DENGAN KKP 2022-2026

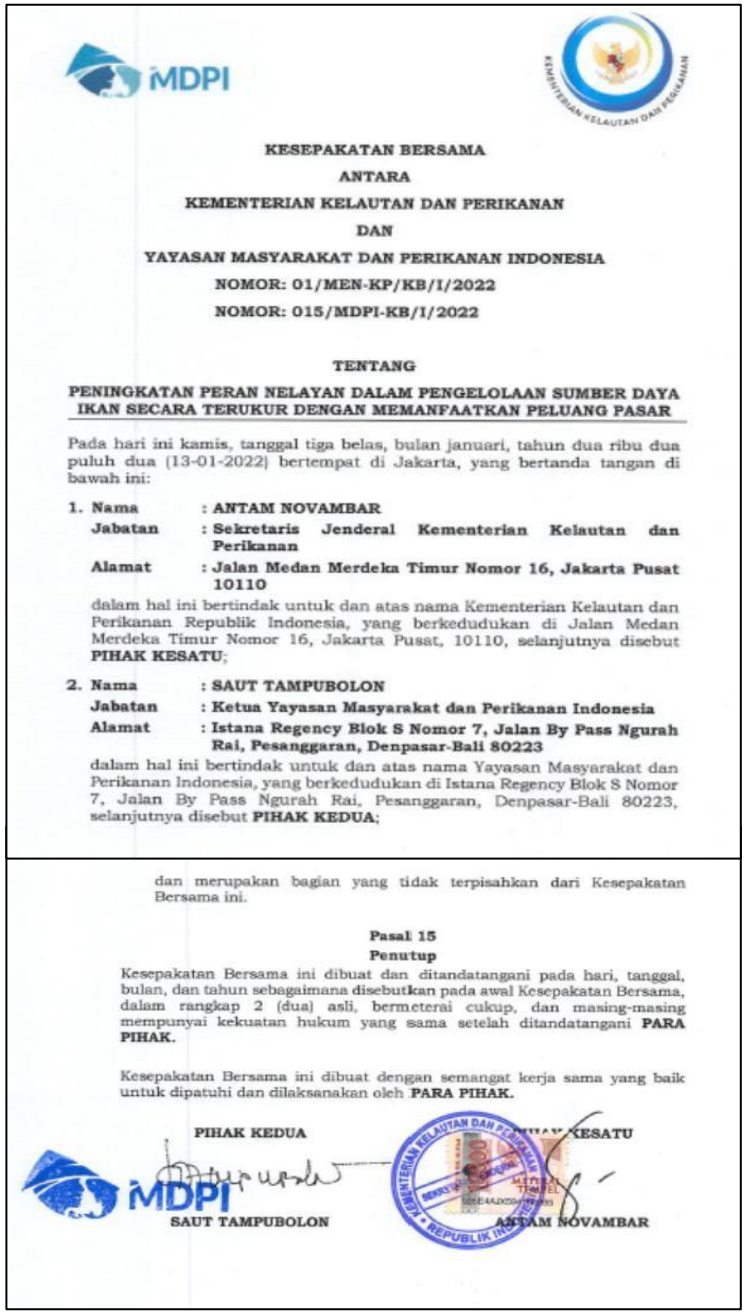

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
YAYASAN MASYARAKAT DAN PERIKANAN INDONESIA
NOMOR: 01/MEN-KP/KB/1/2022
NOMOR: 015/MDPI-KB/1/2022

TENTANG

PENINGKATAN PERAN NELAYAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN SECARA TERUKUR DENGAN MEMANFAATKAN PELUANG PASAR

Pada hari ini kamis, tanggal tiga belas, bulan januari, tahun dua ribu dua puluh dua (13-01-2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : **ANTAM NOVAMBAR**
   Jabatan : **Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan**
   Alamat : **Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110**

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Nama** : **SAUT TAMPUBOLON**
   Jabatan : **Ketua Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia**
   Alamat : **Istana Regency Blok S Nomor 7, Jalan By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar-Bali 80223**

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia, yang berkedudukan di Istana Regency Blok S Nomor 7, Jalan By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar-Bali 80223, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 15
Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
SAUT TAMPUBOLON	ANTAM NOVAMBAR

Kegiatan MDPI di Provinsi NTT

- Supplier Mitra: UD. TH, CV. ASK dan Era Mandiri Cemerlang.
- Kegiatan Port Sampling Pada Handline Tuna di PPI Oeba, Kupang. Mulai 2022, MDPI bekerjsama dengan AP2HI berkolaborasi dalam kegiatan port sampling.
- Pemasangan vessel tracker pada kapal Handlune Tuna
- Site Assessment di SIKKA
- Site Assessment di Kota Kupang : Kelurahan Namosain, Kelurahan Kelapa Lima
- Penyediaan data tuna untuk kebutuhan Harvest Strategy tuna, RFMO dan verifikasi data statistic perikanan tangkap KKP
- MDPI melakukan pembaharuan pelaksanaan FIP pada YFT-Handline Tuna IOTC setiap 6 Bulan bersama AP2HI dan YII
- Mendukung kegiatan validasi dan verifikasi data perikanan tangkap NTT
- Melaksanakan dua kali pertemuan regular KPBP NTT dan satu kali Pertemuan Regional setiap tahun
- KPBP melaporkan isu strategis dalam operasi penangkapan ikan oleh nelayan kecil ke KKP
- Mendukung pelaksanaan FIP pada perikanan Gurita di Sikka

Komposisi Tangkapan Kapal HL 2018 - 2022

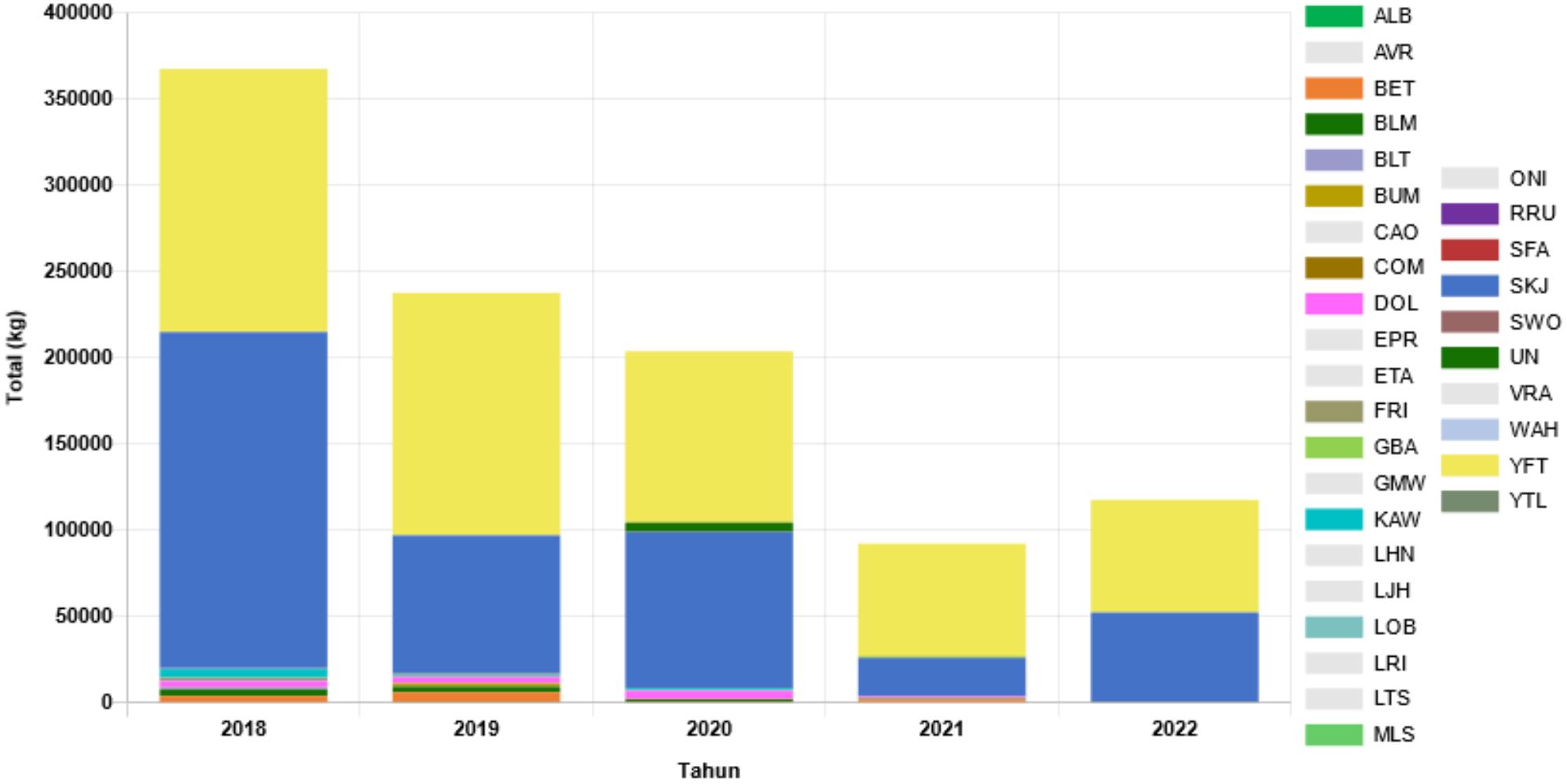

N = 716

Spesies	ALB	AVR	BET	BLM	BLT	BUM	CAO	COM	DOL	EPR	ETA	FRI	GBA	GMW	KAW	LHN	LJH	LOB	LRI	LTS	MLS	ONI	RRU	SFA	SKJ	SWO	UN	VRA	WAH	YFT	YTL	Grand Total
2018	0 0.0%	30 0.0%	3.788 1.0%	3.795 1.0%	992 0.3%	0 0.0%	39 0.0%	105 0.0%	3.789 1.0%	27 0.0%	11 0.0%	1.808 0.5%	0 0.0%	108 0.0%	4.926 1.3%	25 0.0%	10 0.0%	0 0.0%	238 0.1%	48 0.0%	48 0.0%	0 0.0%	197 0.1%	0 0.0%	194.855 53.0%	19 0.0%	0 0.0%	20 0.0%	89 0.0%	152.611 41.5%	1 0.0%	367.579
2019	211 0.1%	0 0.0%	5.833 2.5%	3.139 1.3%	209 0.1%	1.762 0.7%	0 0.0%	47 0.0%	3.613 1.5%	0 0.0%	0 0.0%	592 0.2%	3 0.0%	0 0.0%	686 0.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	355 0.1%	2 0.0%	207 0.1%	69 0.0%	80.154 33.7%	106 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	30 0.0%	140.549 59.2%	0 0.0%	237.567
2020	0 0.0%	0 0.0%	303 0.1%	1.418 0.7%	52 0.0%	230 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	4.840 2.4%	0 0.0%	0 0.0%	320 0.2%	0 0.0%	0 0.0%	1.075 0.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	221 0.1%	0 0.0%	36 0.0%	0 0.0%	90.431 44.4%	45 0.0%	5.393 2.6%	0 0.0%	3 0.0%	99.281 48.8%	0 0.0%	203.648
2021	0 0.0%	0 0.0%	1.551 1.7%	480 0.5%	0 0.0%	418 0.5%	0 0.0%	0 0.0%	1.036 1.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	70 0.1%	0 0.0%	22.190 24.1%	0 0.0%	686 0.7%	0 0.0%	40 0.0%	65.595 71.2%	0 0.0%	92.066
2022	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	136 0.1%	0 0.0%	125 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	21 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	51.966 44.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	65.287 55.5%	0 0.0%	117.535

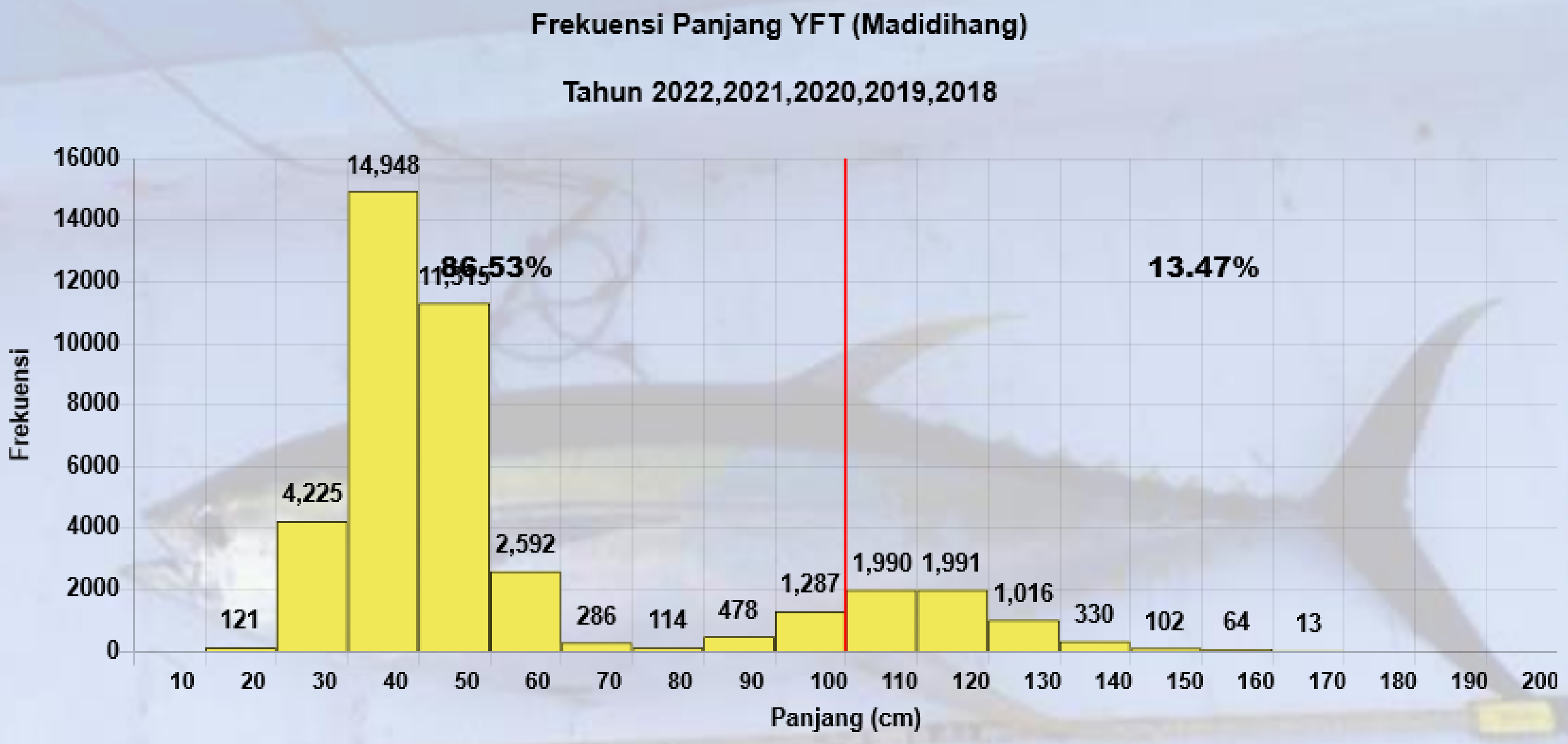
Frekuensi Panjang YFT (Madidihang)
Tahun 2022,2021,2020,2019,2018
Frekuensi
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
121
4,225
14,948
11,515
2,592
286
114
478
1,287
1,990
1,991
1,016
330
102
64
13
86.53%
13.47%
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
Panjang (cm)

N = 716

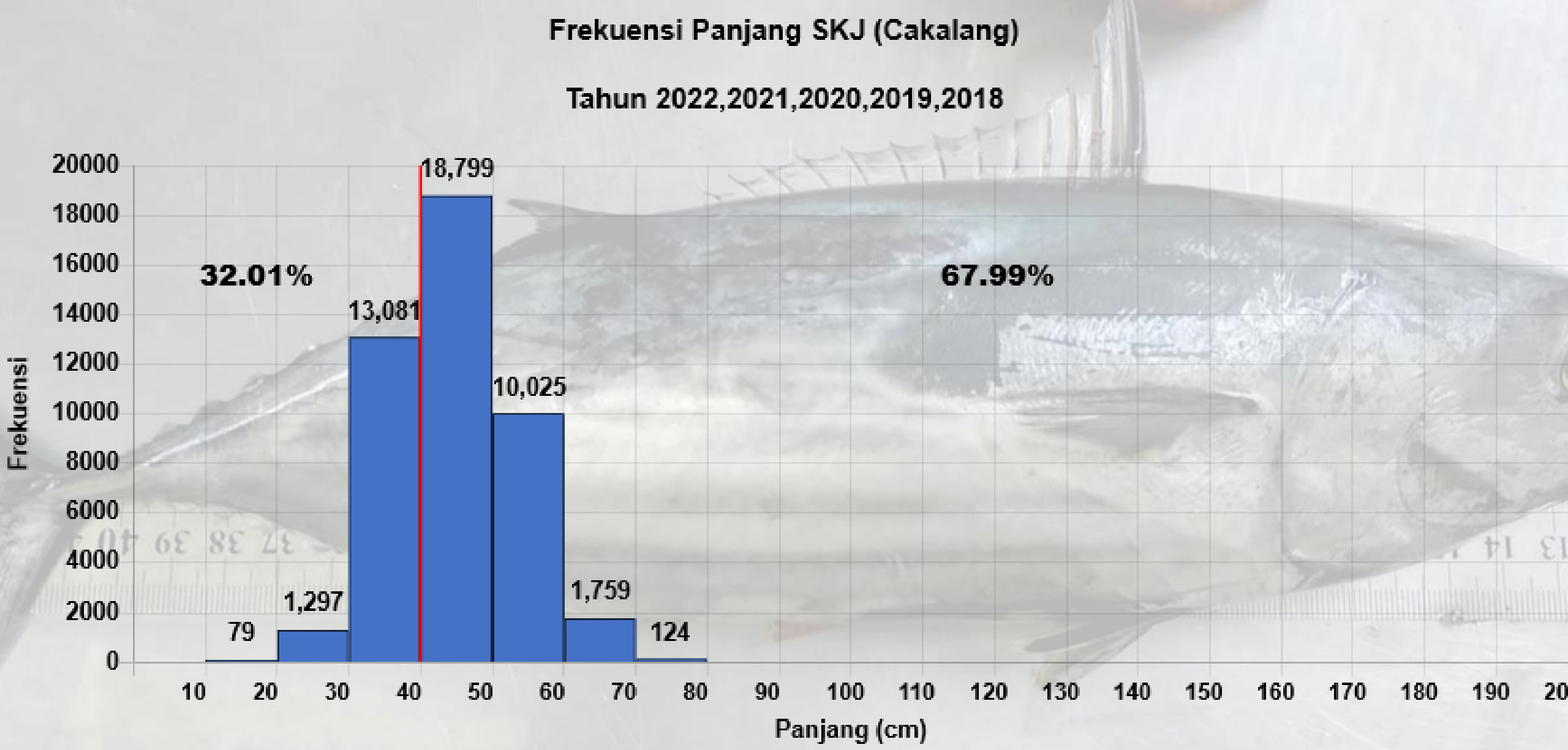
Frekuensi Panjang SKJ (Cakalang)
Tahun 2022,2021,2020,2019,2018
Frekuensi
Panjang (cm)
32.01%
67.99%
79
1,297
13,081
18,799
10,025
1,759
124
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

N = 716

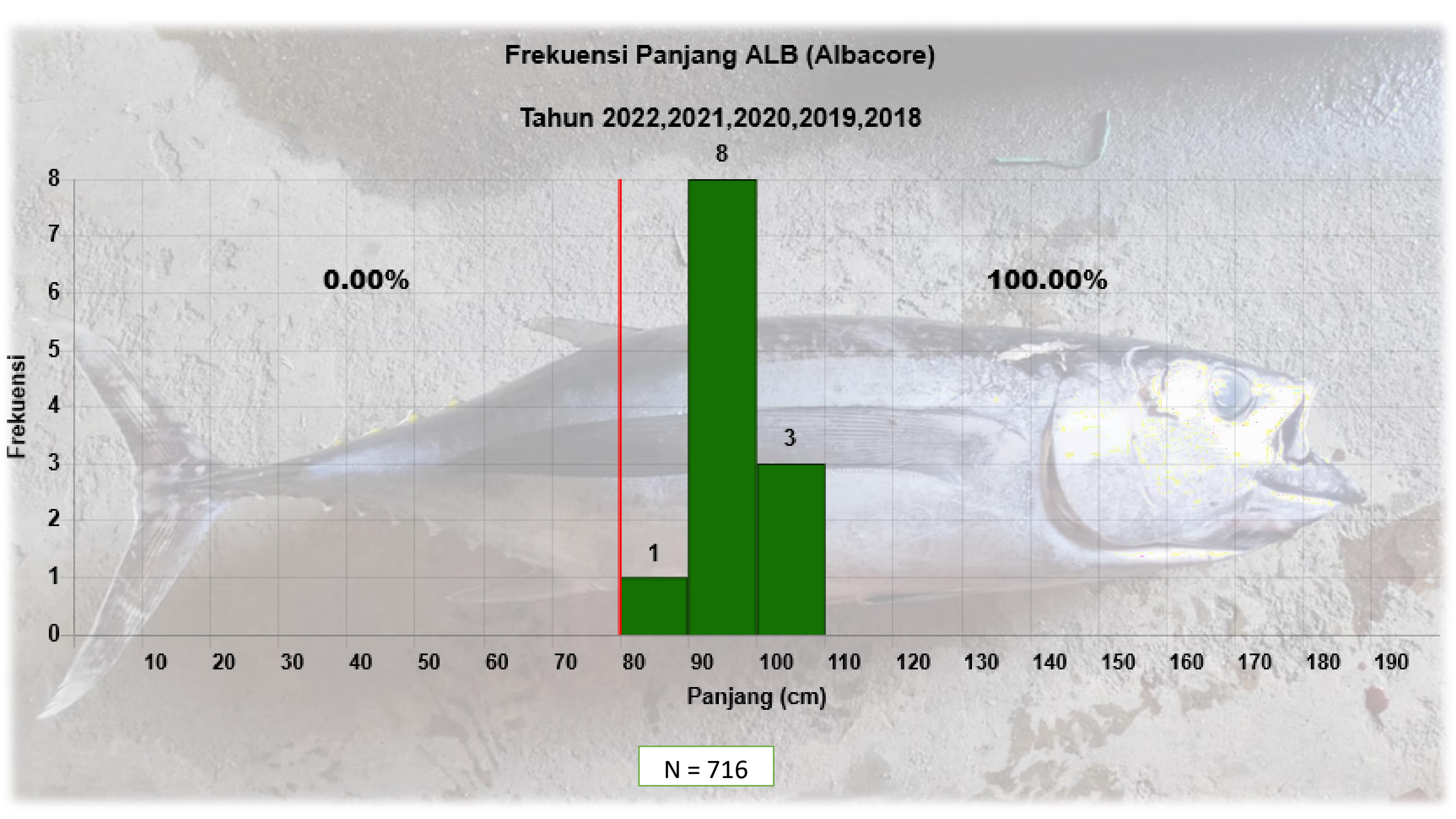
Frekuensi Panjang ALB (Albacore)
Tahun 2022,2021,2020,2019,2018
0.00%
100.00%
8
3
1
Frekuensi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
Panjang (cm)
N = 716

Frekuensi Panjang BET (Tuna Mata Besar)

Tahun 2022,2021,2020,2019,2018

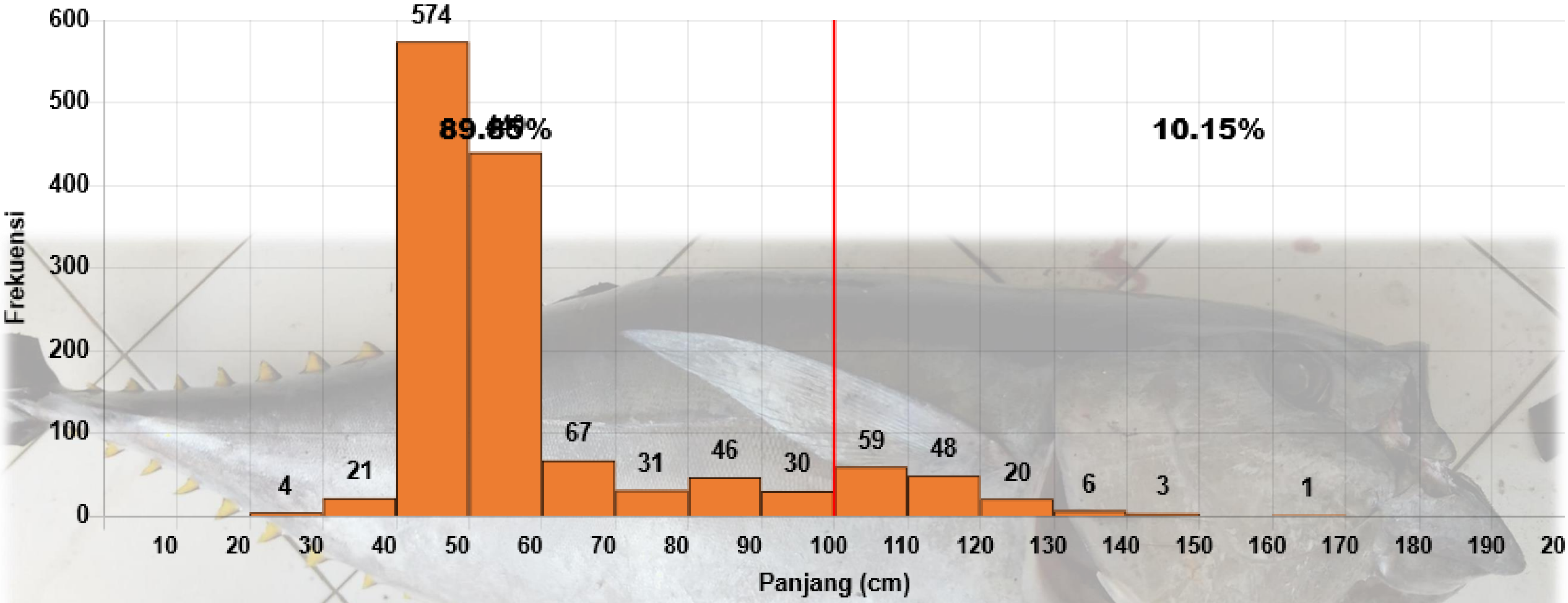

N = 716

Hasi Implementasi vessel tracke dari tahun 2016-2022

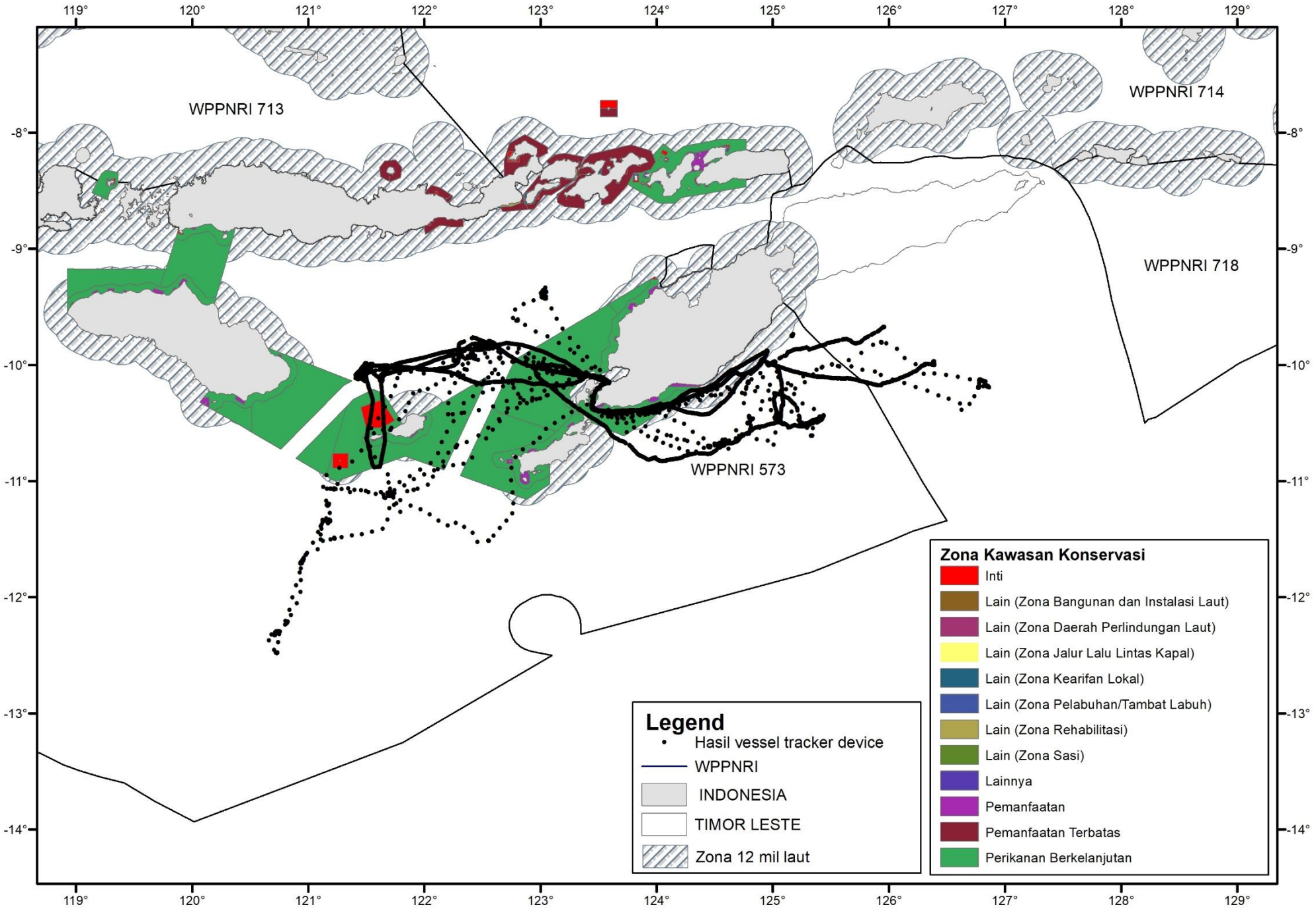

Hasil Vessel Tracker PDS 2023

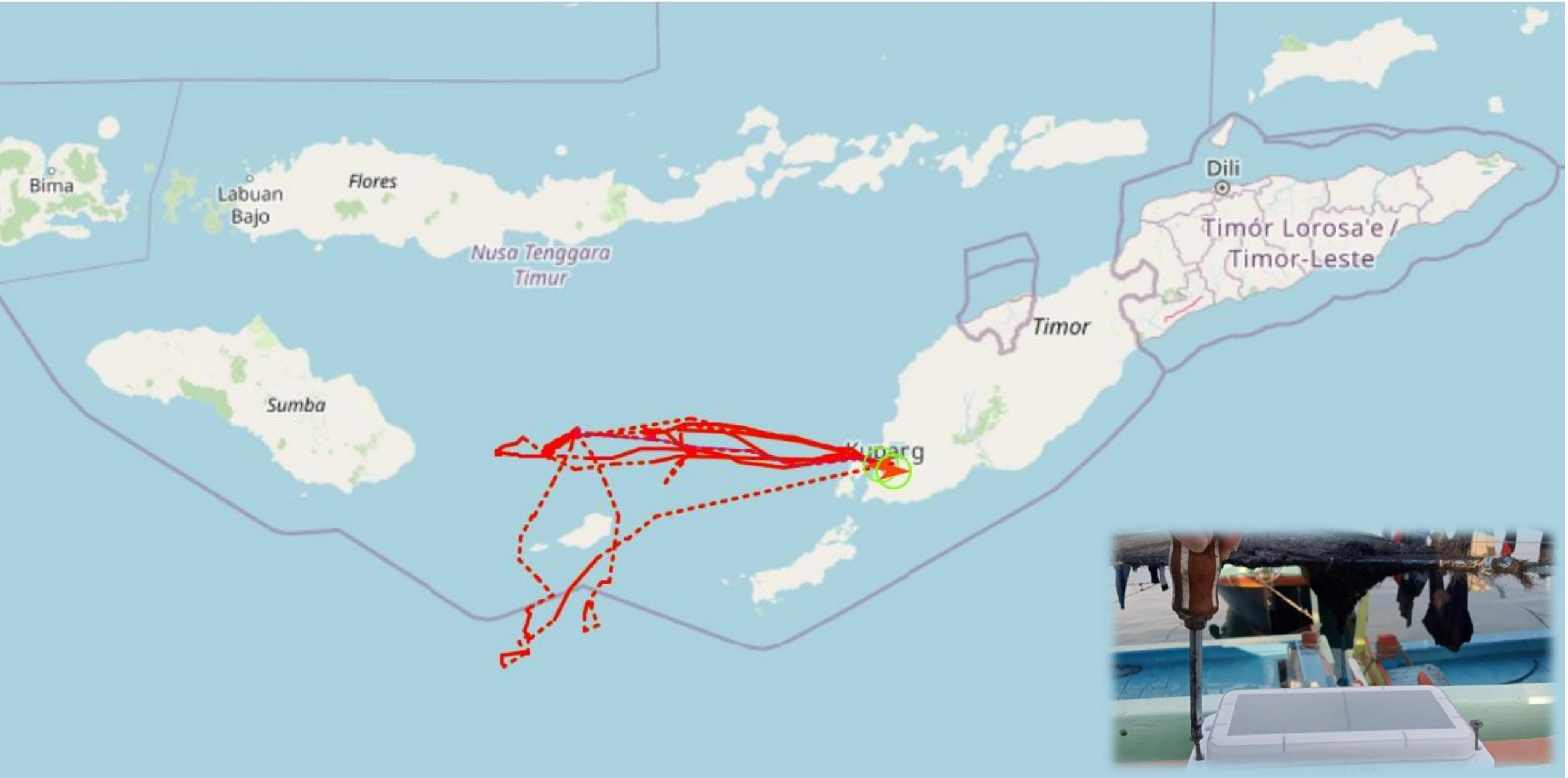

Daerah Tangkapan Nelayan Handline Tuna Selama 2019 – 2022

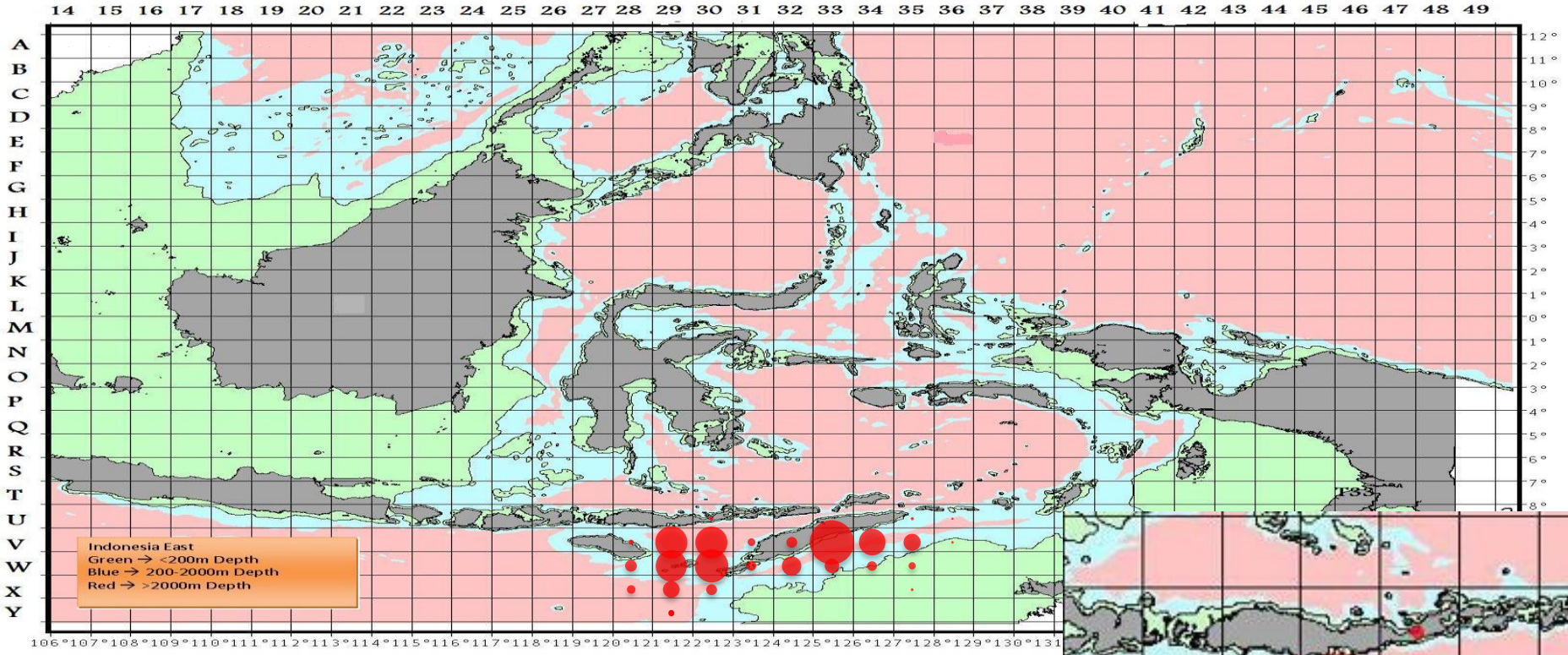

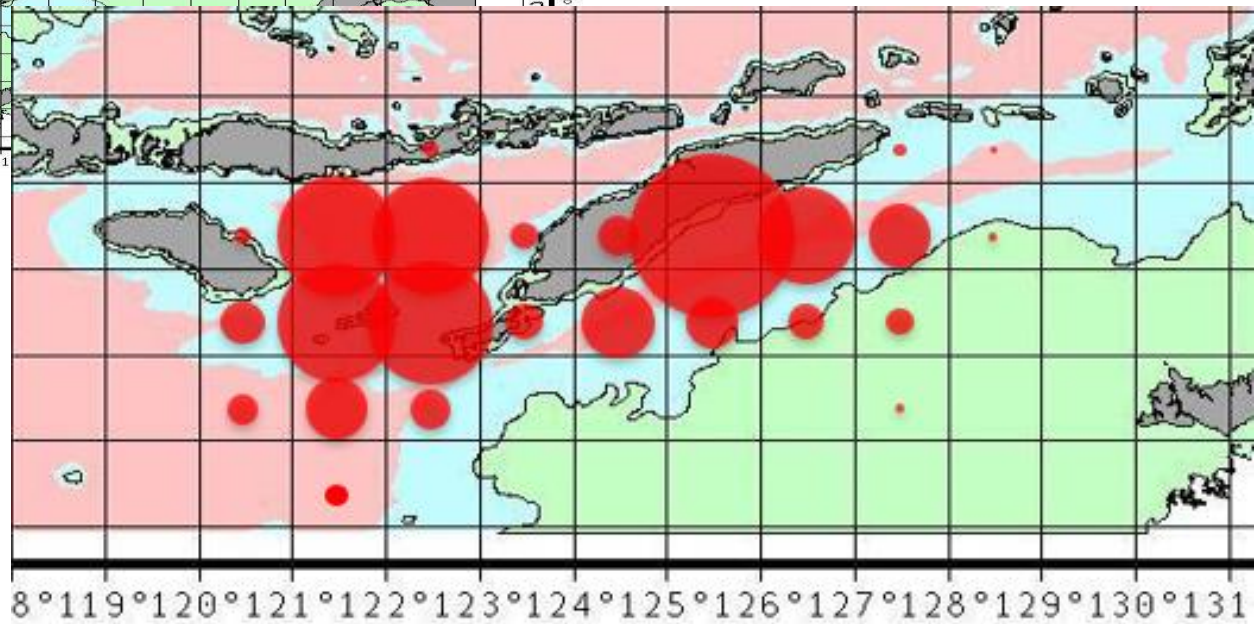

Keterangan:

1. Bulatan merah merupakan lokasi tangkapan nelayan
2. Semakin besar bulatan merah maka semakin banyak hasil tangkapan dan sering kunjungan nelayan di lokasi tersebut
3. Dalam satu kotak merupakan 1^0 x 1^0 = 60 NM x 60 NM

Tantangan Pengumpulan Data

- Tuna Besar dan tuna kecil dibongkar terpisah
- Sulit melihat tangkapan sampingan jika hanya fokus pada supplier
- Waktu bongkaran kapal yang menyesuaikan dengan Pasang Surut air laut.
- Proses bongkaran ikan yang cepat, sehingga sampling tidak maksimal
- Masih kurang terbukanya supplier dalam memberikan catatan hasil tangkapan bulanan (Monthly Unloading)

Pembelajaran Proses Perizinan Rumpon

Lokasi Uji Coba Pendaftaran Rumpon

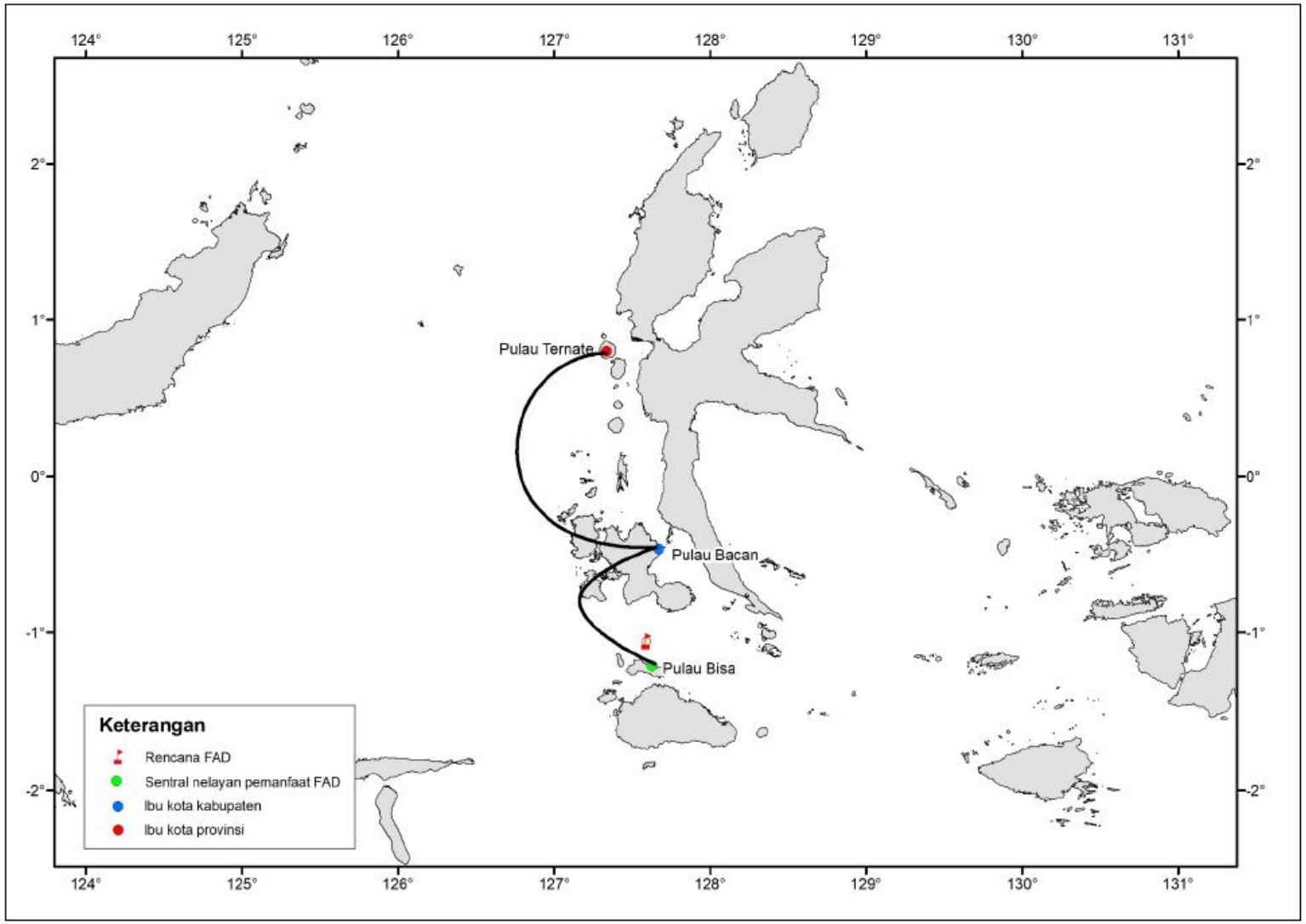

Koprasi
Komite Tuna Bisa Mandioli

AHU-0009366.AH.01.26 Tahun 2021

NIB 8205190050002

RINGKASAN PROSES YANG TELAH DILAKUKAN

Pembentukan Koprasi

Sosialisasi
Pembentukan
Akta notaris
NIB

Pendaftaran kapal

Pengukuran kapal
Pas kecil
Pembuatan email
Pembuatan NIB
Pembuatan TDKP

Pengajuan PKKPRL

Rencana bangunan dan instalasi laut
Info pemafaatan ruang laut
Kondisi terkini lokasi (hidrografi, ekosistem, dasar laut, sosek)
Surat kesesuaian RZWP3K dari DKP Provinsi

Pengajuan perizinan rumpon

1.Surat permohonan ke DPMPTSP
2.Surat pernyataan Koprasi
3.KTP dan NPWP PJ
4.NIB koprasi
5.Surat rekomendasi UPP
6.Surat rekomendasi teknis dari DKP
7Akta notaris
8.PKKPRL
9.Gambaran umum FAD
10.TDKP per nelayan

SIPR yang terbit melalui PTSP

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN PENEMPATAN RUMPON (SIPR)
NOMOR : 502/01/DPMPTSP/SIPR/XII/2022

IDENTITAS KOPERASI		REFERENSI
NAMA	: KOPERASI KOMITE TUNA BISA MANDIOLI	SURAT PERMOHONAN SIPR NOMOR : - TANGGAL : 19 Desember 2022 STATUS : Baru
ALAMAT	: Desa Madapola Barat Kec. Obi Utara Kab. Halmahera Selatan	NAMA KAPAL : Terlampir NIB : Terlampir
PENANGUNGJAWAB	: AHMAD ABDURAHMAN	NOMOR PERIZINAN BERUSAHA SUB. SEKTOR PENANGKAPAN IKAN : Terlampir
NO. TELPI FAX	: 081243970620	

DATA RUMPON

DAERAH PENANGKAPAN DALAM PERIZINAN BERUSAHA SUB. SEKTOR PENANGKAPAN IKAN	: Laut Halmahera dan Laut Maluku	TITIK KOORDINAT		
		NO.	BUJUR	LINTANG
		1	127° 35' 27, 267" BT	1° 3' 24, 236" LS
		2	127° 35' 27, 753" BT	1° 3' 24, 236" LS
		3	127° 35' 27, 753" BT	1° 3' 24, 724" LS
		4	127° 35' 27, 267" BT	1° 3' 24, 724" LS
LUAS AREAL	: 0.02 Hektare			

KOMPONEN

1. PELAMPUNG		4. KEDALAMAN PERAIRAN	: 2500 Meter
BAHAN UTAMA	: Styrofoam	5. BAHAN TANDA PENGENAL	: Kayu dicat Dasar Warna Orange
VOLUME	: 120 MP	6. BAHAN RADAR REFLEKTOR	: Logam
2. PEMBERAT		7. ATRAKTOR	
BAHAN UTAMA	: Beton	BAHAN ALAMI	: Daun Kelapa
BERAT TOTAL	: 700 Kg	BAHAN SINTETIK	: -
3. TALI RUMPON			
BAHAN	: Tali Rafia		
PANJANG	: 400 Meter / Bal		

CATATAN	MASA BERLAKU
	Sejak 20 Desember 2022 Sampai dengan 20 Desember 2024

TEMBUSAN
1. Gubernur Maluku Utara di - Sofifi (sebagai laporan)
2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di – Jakarta
3. Bupati/Walikota Se - Kab/Kota di - Maluku Utara
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara
5. Kepala Dinas Perikanan Se - Kab/Kota di - Maluku Utara
6. DANLANAL Ternate
7. Kepala KSOP dan KLPP Kab/Kota di – Maluku Utara
8. Dit. POLAIR POLDA Maluku Utara di Sofifi
9. Kepala PPN Ternate, Kepala BPPP Wilayah I,II,III dan IV
10. Pertinggal

Sofifi, 20 Desember 2022
A.n. GUBERNUR MALUKU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA

HAMDANG HERNIWAN, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650609 198603 1 001

Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali

Halaman depan

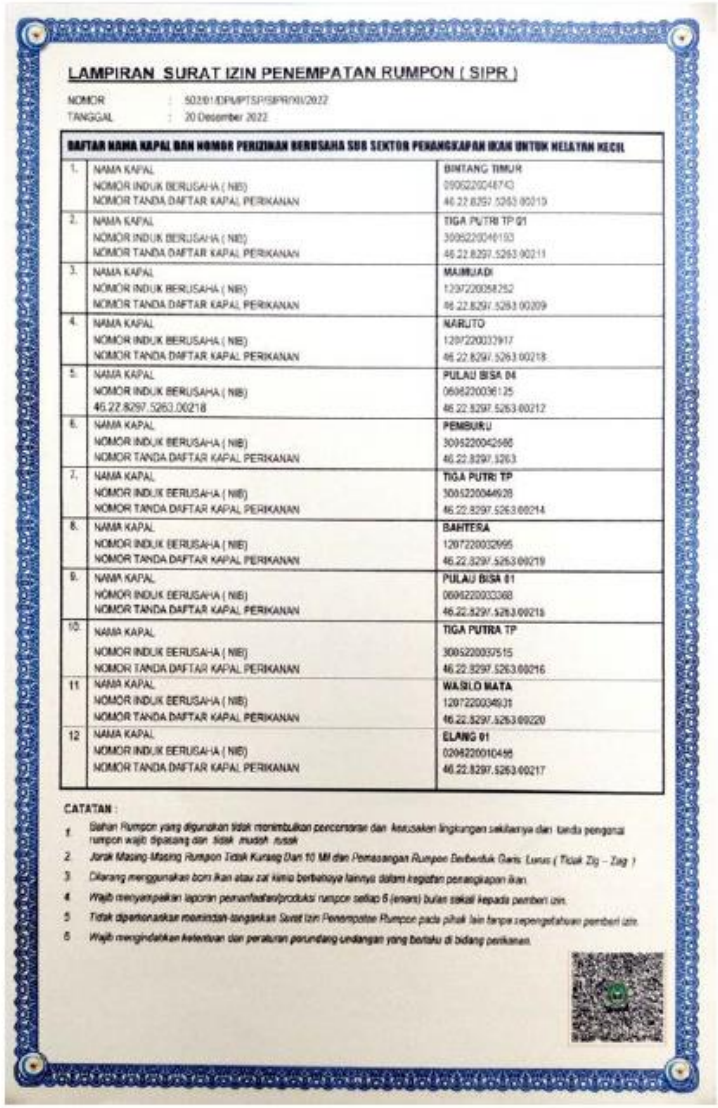

LAMPIRAN SURAT IZIN PENEMPATAN RUMPON (SIPR)

NOMOR : 502/01/DPMPTSP/SIPR/XII/2022
TANGGAL : 20 Desember 2022

DAFTAR NAMA KAPAL DAN NOMOR PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN UNTUK NELAYAN KECIL

1.	NAMA KAPAL NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) NOMOR TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN	BINTANG TIMUR 0906220048743 46.22.8297.5263.00213
2.	NAMA KAPAL NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) NOMOR TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN	TIGA PUTRI TP 01 3006220046193 46.22.8297.5263.00211
3.	NAMA KAPAL NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) NOMOR TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN	MAIMUADI 1207220058252 46.22.8297.5263.00209
4.	NAMA KAPAL NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) NOMOR TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN	NARUTO 1207220032917 46.22.8297.5263.00218
5.	NAMA KAPAL NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 46.22.8297.5263.00218	PULAU BISA 04 0606220036125 46.22.8297.5263.00212
6.	NAMA KAPAL NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) NOMOR TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN	PEMBURU 3006220042686 46.22.8297.5263
7.	NAMA KAPAL NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) NOMOR TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN	TIGA PUTRI TP 3006220044928 46.22.8297.5263.00214
8.	NAMA KAPAL NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) NOMOR TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN	BAHTERA 1207220032995 46.22.8297.5263.00219
9.	NAMA KAPAL NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) NOMOR TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN	PULAU BISA 01 0606220033068 46.22.8297.5263.00215
10.	NAMA KAPAL NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) NOMOR TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN	TIGA PUTRA TP 3006220037515 46.22.8297.5263.00216
11	NAMA KAPAL NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) NOMOR TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN	WASILO MATA 1207220034931 46.22.8297.5263.00220
12	NAMA KAPAL NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) NOMOR TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN	ELANG 01 0206220010466 46.22.8297.5263.00217

CATATAN :
1. *Bahan Rumpon yang digunakan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan sekitarnya dan tanda pengenal rumpon wajib dipasang dan tidak mudah rusak*
2. *Jarak Masing-Masing Rumpon Tidak Kurang Dari 10 Mil dan Pemasangan Rumpon Berbentuk Garis Lurus (Tidak Zig – Zag)*
3. *Dilarang menggunakan bom ikan atau zat kimia berbahaya lainnya dalam kegiatan penangkapan ikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan pemanfaatan/produksi rumpon setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin.*
5. *Tidak diperkenankan memindah-tangankan Surat Izin Penempatan Rumpon pada pihak lain tanpa sepengetahuan pemberi izin.*
6. *Wajib mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan.*

Halaman belakang

SIPR yang terbit melalui OSS

Halaman depan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

SURAT IZIN PENEMPATAN RUMPON

LAMPIRAN

PBUMKU : 1256000723903000300001

Lampiran berikut memuat data teknis Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR) untuk:

REFERENSI		
1. Nomor SIUP	:	
2. Revisi	:	
3. Tanggal	:	
4. Kode KBLI	:	[03111] Penangkapan Placea/Ikan Bersirip di laut

DATA RUMPON		
1. Kode Referensi Teknis	:	00.22.00.8298.0001
2. Jenis Rumpon	:	RUMPON MENETAP PERMUKAAN
3. Koordinat Titik Pusat	:	Latitude: BT 127° 35' 267', Longitude: LS 1° 3' 235'
4. Daerah Penangkapan Ikan	:	WPP-RI 715
5. Bahan Utama Pelampung	:	Gabus / Polystyrene
6. Volume Pelampung	:	120
7. Bahan Utama Pemberat	:	Beton
8. Berat Total Pemberat (KG)	:	700
9. Bahan Tali Rumpon	:	Tali Sintetik
10. Panjang Tali Rumpon (Meter)	:	400
11. Kedalaman Perairan	:	2500
12. Bahan Tanda Pengenal	:	Papan Kayu
13. Bahan Alami Attraktor	:	Daun Kelapa
14. Bahan Sintetik Attraktor	:	Lainnya
15. Bahan Radar Attraktor	:	Besi

KETERANGAN

Halaman belakang

DAFTAR NAMA KAPAL DAN NO. PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN UNTUK NELAYAN KECIL

1	Nama Kapal	BINTANG TIMUR
	NIB	0906220048743
	Nomor Perizinan Berusaha	46.22.8297.5263.00210
2	Nama Kapal	TIGA PUTRI TP 01
	NIB	3005220040193
	Nomor Perizinan Berusaha	46.22.8297.5263.00211
3	Nama Kapal	MAIMUADI
	NIB	1207220058252
	Nomor Perizinan Berusaha	46.22.8297.5263.00209
4	Nama Kapal	NARUTO
	NIB	1207220033917
	Nomor Perizinan Berusaha	46.22.8297.5263.00218
5	Nama Kapal	PULAU BISA 04
	NIB	0906220036125
	Nomor Perizinan Berusaha	46.22.8297.5263.00212
6	Nama Kapal	PEMBURU
	NIB	3005220042566
	Nomor Perizinan Berusaha	46.22.8297.5263.00213
7	Nama Kapal	TIGA PUTRI TP
	NIB	3005220044928
	Nomor Perizinan Berusaha	46.22.8297.5263.00214
8	Nama Kapal	BAHTERA
	NIB	1207220032995
	Nomor Perizinan Berusaha	46.22.8297.5263.00219
9	Nama Kapal	PULAU BISA 01
	NIB	0906220033968
	Nomor Perizinan Berusaha	46.22.8297.5263.00215
10	Nama Kapal	TIGA PUTRA TP
	NIB	3005220037515
	Nomor Perizinan Berusaha	46.22.8297.5263.00216
11	Nama Kapal	WASILO MATA
	NIB	1207220034931
	Nomor Perizinan Berusaha	46.22.8297.5263.00220
12	Nama Kapal	ELANG 01
	NIB	0206220010456
	Nomor Perizinan Berusaha	46.22.8297.5263.00217

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan ini dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan tak akses.

Pembelajaran :

- Proses pengurusan PKKPRL sekitar 7 bulan karena harus mempelajari berbagai persyaratan dan teknis di OSS terutama untuk PKKPRL dan SIPR
- Koordinasi dan Kolaborasi antar stakeholder terkait KKP, DKP, PTSP, Nelayan, NGO sangat penting
- Diskusi melalui forum rumpon 1 di Bogor dan diskusi melalui forum KPBP di tingkat provinsi untuk mendapatkan arahan, serta isu dalam PKKPRL dan SIPR
- Persyaratan yang cukup banyak dan belum tersosialisasi secara luas menjadi tantangan bagi mitra pelaku usaha yang akan mendafatrakan PKKPRL maupun SIPR

Ringkasan

1. Hasil tangkapan banyak juga ikan kecil, namun masih konsumsi local mungkin dibutuhkan strategy agar bisa rkspor juga seperti hasil tangkapan Pole & Line ?

2. Metode tangkap didominasi mengunkan rumpon sehingga perlu kita coba uji coba pendaftaran rumpon

3. Lokasi tangkap yang melebihi 12 mil, bagaimana kebijakan daerah dan pusat, karena GT kapal masih di bawah 30 mil ?

4. Lokasi tangkap lebih dari 12 mil laut bagaimana dengan SKN untuk ABK ?

Terima Kasih

AP2HI
Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia
Indonesian Pole & Line and Handline Fisheries Association

indonesian tuna
Sustainable by tradition One-by-one

UPDATE PRINSIP TERBARU FIP (ASPEK HAM, SOSIAL) DAN PERKEMBANGAN PERMINTAAN PASAR GLOBAL SERTA UPAYA PRIVATE SECTOR (ASOSIASI) MEMENUHI KEBUTUHAN TERSEBUT

DISAMPAIKAN PADA ACARA REGULER KPBP NTT 2023

KUPANG, 12 JULI, 2023

AGENDA

- UPDATE ANGGOTA AP2HI DI NTT
- UPDATE FIP (ASPEK SOSIAL)
- PERKEMBANGAN PASAR GLOBAL
- UPAYA PEMENUHAN DAN PENINGKATAN KEBUTUHAN AKSES PASAR GLOBAL
- UPDATE FISHERYPROGRESS & MSC 2nd TRANCHE

indonesian tuna
Sustainable by tradition One-by-one

Anggota AP2HI Di NTT

1

BERKOLABORASI DENGAN

2

Update FIP Aspek Sosial

HAK ASASI MANUSIA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PADA AWAK KAPAL PERIKANAN

DI DUKUNG OLEH

Materi penyuluhan ini merupakan adaptasi dari materi Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial milik Fisheryprogress.org yang diterbitkan pada Desember 2022.

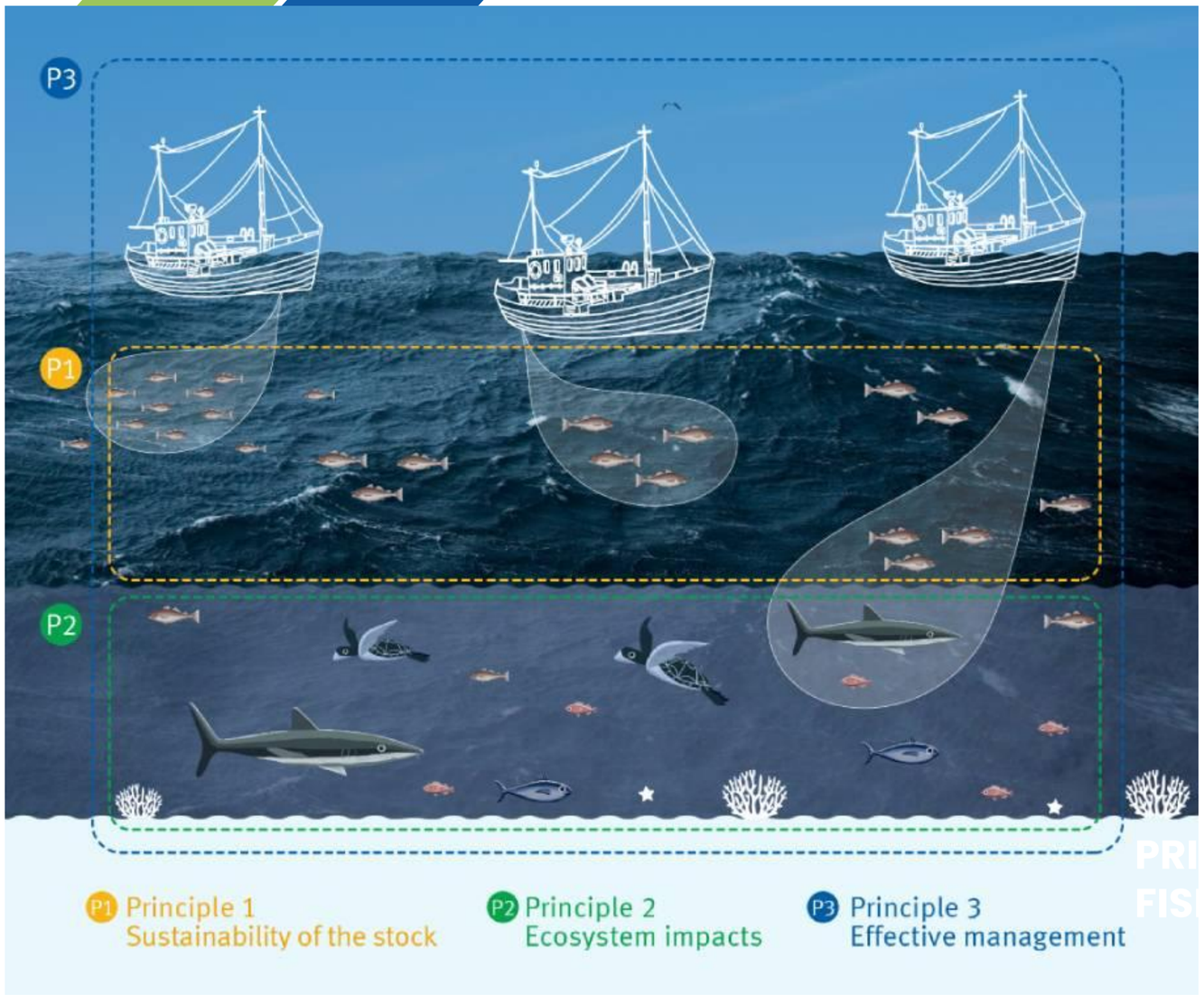

PRINSIP UTAMA DALAM PERBAIKAN PERIKANAN

P1

KELESTARIAN STOCK IKAN

P2

DAMPAK EKOSISTEM

P3

MANAJEMEN YANG EFEKTIF

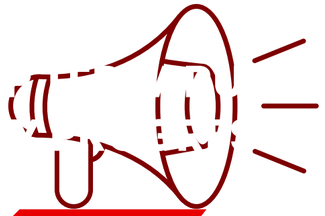

P4

DAMPAK SOSIAL PADA NELAYAN

PRINSIP TERBARU DARI FISHERY PROGRESS

NEW

MEMBERIKAN & MENGHORMATI KEBEBASAN AWAK KAPAL DALAM BERKELOMPOK DAN BERASOSIASI

APA SAJA ?

- Kebebasan membentuk organisasi nelayan/ pekerja/ serikat dagang yang bertujuan membela dan melindungi hak serta menentukan struktur, kebijakan, dan program lainnya tanpa campur tangan pihak luar.
- Tidak terdapat diskriminasi terhadap nelayan anggota/serikat/koperasi.
- Pembela HAM tidak ditekan/dituntut secara hukum oleh pemberi kerja.

PENDAPATAN DAN KEUNTUNGAN yang layak, terbuka dan stabil

APA SAJA ?

- Upah yang dibayarkan disertakan dengan slip/ rincian secara tertulis.
- Tingkat upah memenuhi persyaratan minimal sesuai peraturan pemerintah.
- Upah lembur dibayarkan sesuai dengan persyaratan minimal & aturan pemerintah.
- Tidak ada penahanan upah dalam bentuk alasan apapun.
- Menandatangani kontrak yang mudah dipahami bagi segala kalangan.

LINGKUNGAN KERJA AMAN memiliki perlengkapan medis yang memadai

APA SAJA ?

- Trip lebih dari 3 hari membawa daftar anggota dan melaporkan kepada petugas terkait.
- Memiliki akses komunikasi yang memadai untuk kapal ukuran >24m.
- Tersedia perlengkapan pelindung diri yang memadai.
- Prosedur keamanan & kesehatan sesuai standar keselamatan peraturan pemerintah
- Peralatan & obat medis yang memadai.
- Terdapat layanan medis untuk kecelakaan kerja dan dipulangkan apabila diperlukan.

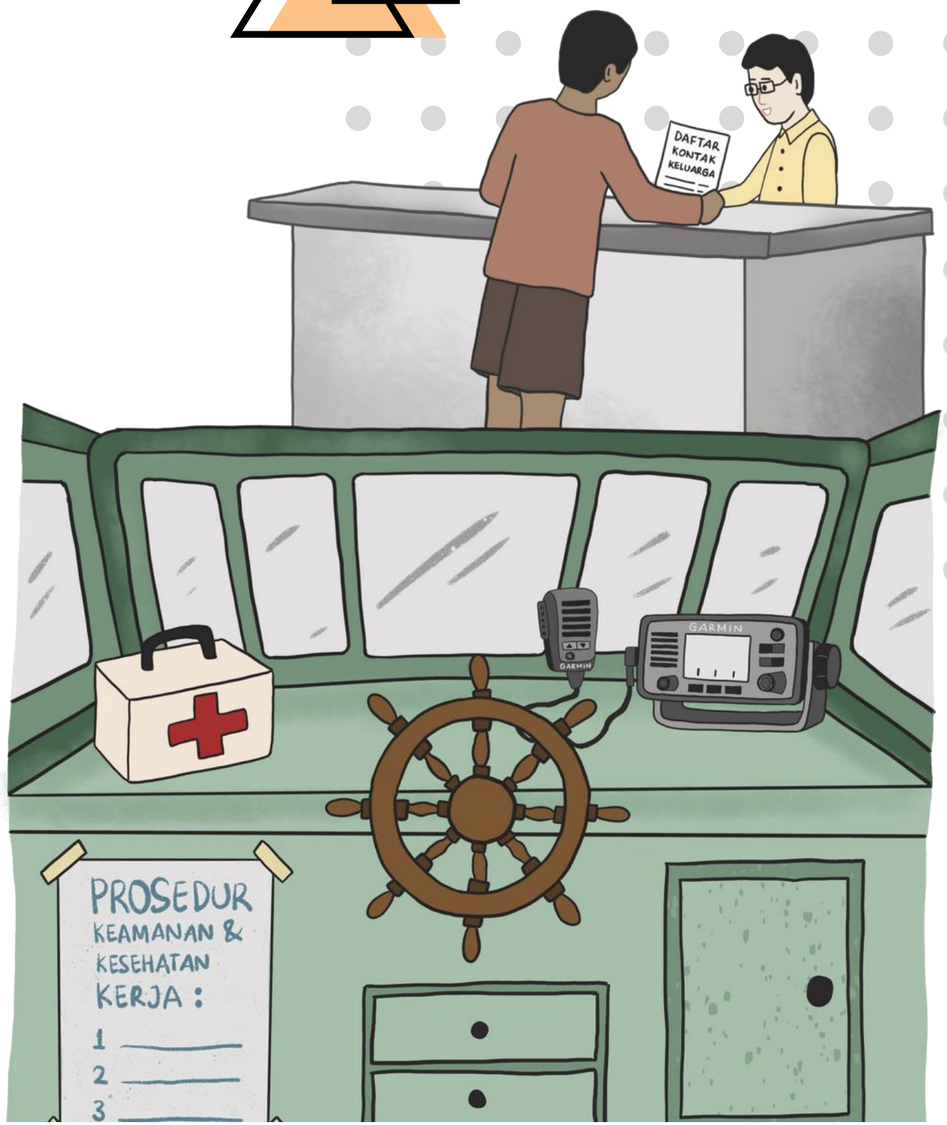

STANDAR HIDUP YANG LAYAK di atas kapal

APA SAJA ?

- Tempat istirahat memiliki alat keselamatan dan sirkulasi udara yang layak.
- Fasilitas kebersihan dengan ruang tertutup yang layak.
- Air minum & makanan yang bersih, layak, dan mudah diakses.

WAKTU ISTIRAHAT YANG LAYAK untuk semua awak kapal tanpa terkecuali

APA SAJA ?

- Terdapat mekanisme mengatur & merekam jumlah jam kerja awak kapal.
- Jam kerja memenuhi persyaratan minimal pemerintah, waktu lembur dibayarkan sesuai peraturan.
- Memiliki minimal 10 jam istirahat dalam kurun waktu 24 jam/77 jam dalam kurun waktu 7 hari.

MEMAHAMI PENANGANAN sampah di atas kapal

APA SAJA ?

- Kapten kapal & ABK paham tentang pengolahan sampah di atas kapal.
- Terdapat tempat penampungan sampah sementara berdasarkan kategori (Organik, Non-organik, & Daur ulang).
- Terdapat materi cara penanganan sampah berupa infografis/lainnya yang tertempel di kapal.
- "Sampah" yang dimaksud meliputi:
- Semua jenis limbah makanan
- Saluran kakus
- Plastik, metal, kertas, dan limbah operasional lainnya.

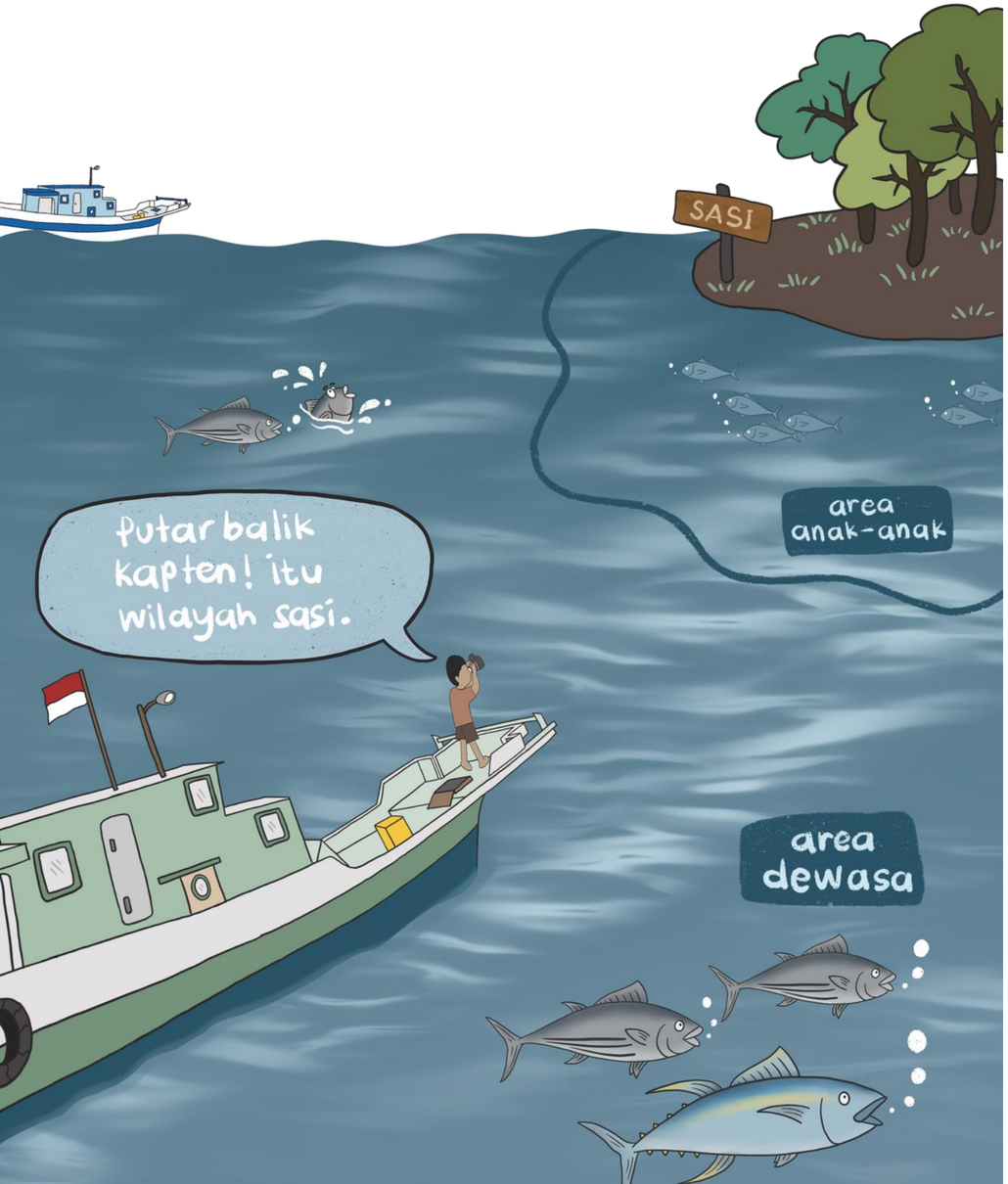

MEMAHAMI PERATURAN dan menghormati hak wilayah jika beroperasi di dalam atau dekat wilayah adat

APA SAJA ?

- Perikanan memandang hak resmi & adat masyarakat lokal.
- Kegiatan perikanan memahami dampak penangkapan ikan terhadap akses adat ke sumber daya ikan & tidak memberikan pengaruh buruk terhadap komunitas masyarakat di dekatnya/membatasi akses ke sumber daya utama tanpa izin komunitas masyarakat tersebut.
- Kegiatan perikanan tidak didesain pada wilayah yang diklaim kuat oleh komunitas adat.

MEMILIKI Perjanjian kerja laut

APA SAJA ?

- Pastikan kedua belah pihak (pemberi dan penerima kerja) mengetahui isi PKL.
- Pastikan kedua belah pihak menandatangani PKL secara langsung.
- Pastikan PKL disimpan oleh secara mandiri/pribadi.
- Pastikan salinan PKL dikirimkan kepada keluarga.

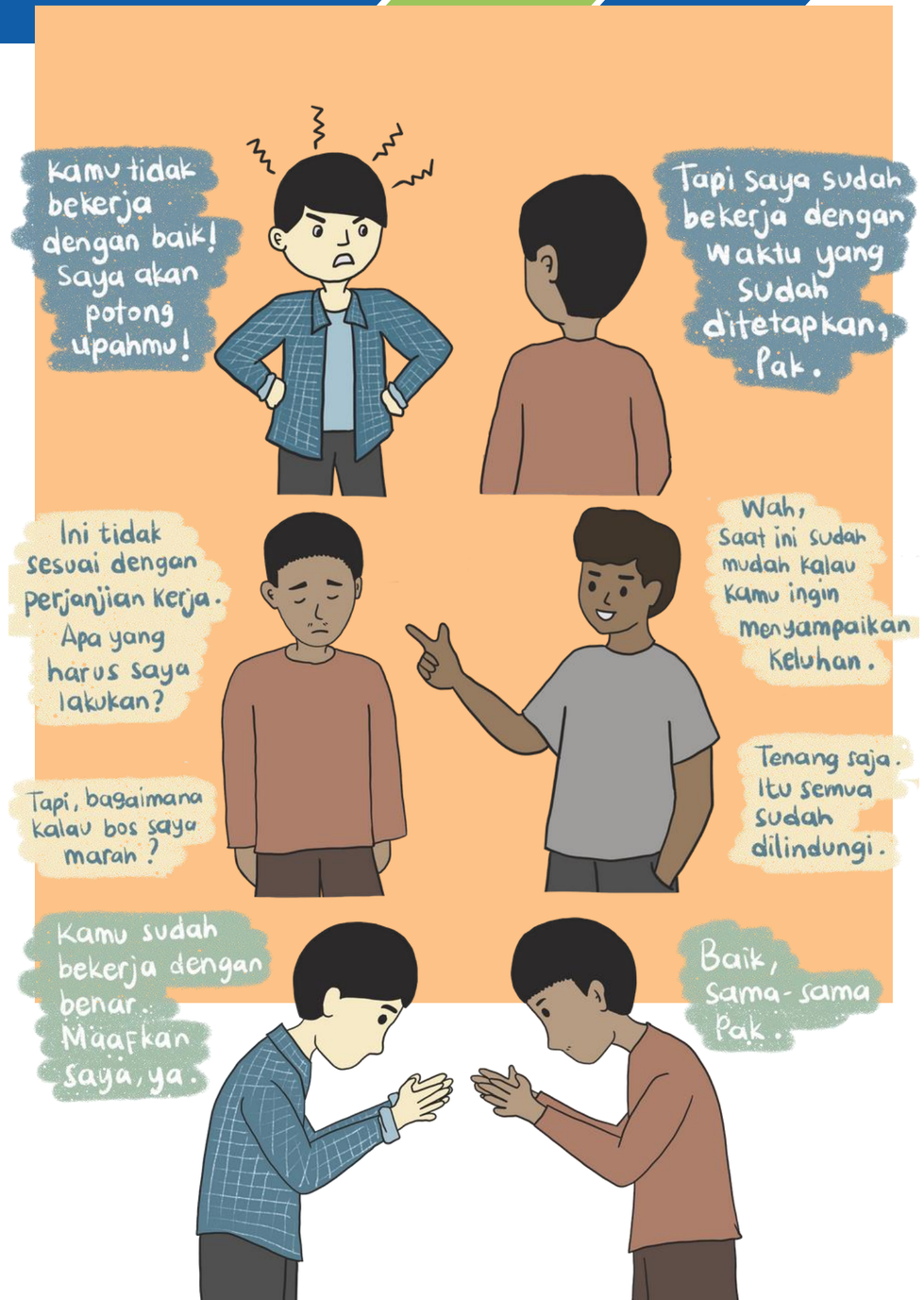

MEMILIKI AKSES UNTUK MEKANISME PENYAMPAIAN KELUHAN YANG EFEKTIF DAN RAHASIA

APA SAJA ?

- Memiliki pengetahuan & akses mekanisme penyampaian keluhan yang efektif, adil, dan rahasia sesuai dengan ukuran & skala perikanan.
- Tidak terdapat pembalasan dendam/praduga terhadap nelayan yang mengajukan keluhan dalam bentuk apapun.

3 Perkembangan Pasar Global

TREN PERMINTAAN TUNA CAKALANG PASAR GLOBAL

Bergabung di AP2HI (HL/PL)

Bersama mitranya, memajukan perikanan HL/PL berkelanjutan

Menjalankan FIP

Melaksanakan kegiatan program perbaikan perikanan

Traceability

Ikan yang ditangkap harus jelas asal usul atau ketertelusurannya

Terafiliasi dalam sertifikat eco-label

Menjalankan standard sertifikasi ekolabel (stock, lingkungan, pengelolaan dan sosial)

4 Upaya Pemenuhan

Bersama mitranya (YII dan MDPI), AP2HI melakukan kegiatan pendataan dan kegiatan tematik lainnya untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan pasar global dalam rangka meningkatkan akses pasar yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perikanan tuna dengan alat tangkap HL / PL

Port Sampling

Kedepan akan menggunakan IFISH dari MDPI

Bagan and Vessel Registration

Total sudah 9 Bagan dan 55 kapal HL terdaftar dan 70 dalam proses, bekerjasama dengan KSOP dan KCD Larantuka

Vessel Verr. & KEN

Include Social Aspect FIP

Data Sosial - Ekonomi

Penyederhanaan form pasca Sosek HS Meeting

Observer Onboard

Meningkatkan jumlah deployment

Kegiatan lainnya

- *Member services (FIP/MSC Verification, penampingan audit, dll)*
- *Indonesian Tuna Promotion*
- *Workshop Nasiona dan lokal*
- *Capacity Building Nelayan*

5. UPAYA PEMENUHAN DAN PENINGKATAN AKSES PASAR

FISHERYPROGRESS.ORG

Species	Gear	Stock	Fisheryprogress profile	FIP ID	Stage	End date	MSC Status	
SKJ	PL	WCPO	https://fisheryprogress.org/fip-pr	8863	Stage 4	June 2023	Certified	
YFT	PL	WCPO	https://fisheryprogress.org/fip-pr	8885	Stage 4	June 2023	Certified	
YFT	HL	WCPO	https://fisheryprogress.org/fip-pr	197	Stage 5	June 2023	Certified	
SKJ	PL	IO	https://fisheryprogress.org/fip-pr	8893	Stage 4	June 2023	Not Certified	
YFT	PL	IO	https://fisheryprogress.org/fip-pr	8895	Stage 4	June 2023	Not Certified	
YFT	HL	IO	https://fisheryprogress.org/fip-pr	9012	Stage 4	June 2023	Not Certified	
SKJ	HL	WCPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	On proccess/confirmed
SKJ	HL	IO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	On proccess/confirmed
YFT	TL	WCPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	On proccess/confirmed
YFT	TL	IO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	On proccess/confirmed
ALB	HL	IO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	On proccess/confirmed
DOL	HL	IO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	?
SKJ	TL	WCPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	On proccess/confirmed
SKJ	TL	IO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	On proccess/confirmed

Penggabungan profil (cth untuk: Handline/Troll Line YFT-SKJ):
start: September 2023

Profil baru:
perlu pre-assessment (pre-assessment Bersama dengan mitra, asosiasi dan NGO lainnya untuk efisiensi dan meringankan biaya)

Timeline pre-assessment:
Start: Agustus 2023
Profil rilis: September 2023 (bersamaan dengan update 6 profil lainnya)

indonesian tuna
Sustainable by tradition One-by-one

Perluasan MSC: 2nd Tranche Area

Wilayah saat ini	Diperluas	
N. Sulawesi & N. Maluku (715, 716)	Maluku & Goíontalo	713, 714, 715 & 716
West Flores (713, 714) PL	South & West Sulawesi West Flores HL East Flores HL	
East Flores (713, 714) PL	Southeast & Central Sulawesi	
Banda Sea (714)	West Papua	

Juli 2023

1. Surveilance audit untuk MSC 1st Tranche
2. Gap analysis saat surveillance audit untuk perluasan MSC 2nd Tranche

AP2HI
Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia
Indonesian Pole & Line and Handline Fisheries Association

ndonesian tuna
ustainable by tradition One-by-one

TERIMA KASIH

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERIKANAN TUNA DALAM MENDUKUNG KEBANGKITAN EKONOMI NTT

STEFANIA T BORO, S.PI, MM

KEPALA DINAS

POTENSI TUNA DI NTT

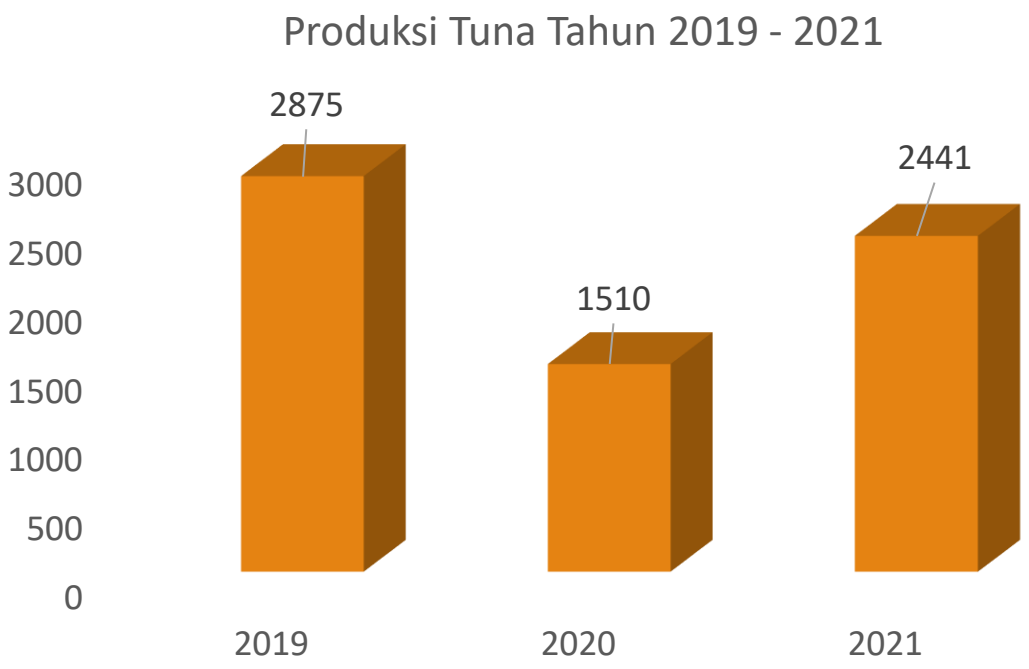

- Tersebar diseluruh WPP yang ada di NTT (WPP 573, WPP 713 dan WPP 714
- Kabupaten potensial : Kota Kupang, Kab Sikka, Lembata dan Flores Timur

DESAIN PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP DI NTT

Grand Design Pengembangan Kelautan dan Perikanan

Berbasis Komoditas Unggulan :

Ketersediaan Lahan, Produksi, Nilai Ekspor, Berdampak bagi ekonomi masyarakat

Berbasis klaster pengembangan :

Infrastruktur, rantai pasok, sentra produksi dan daerah penyangga

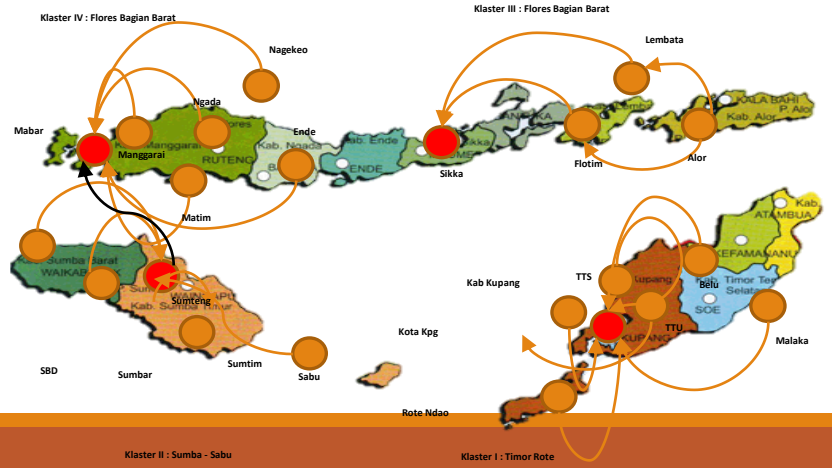

KLASTERISASI PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN PERIKANAN TANGKAP

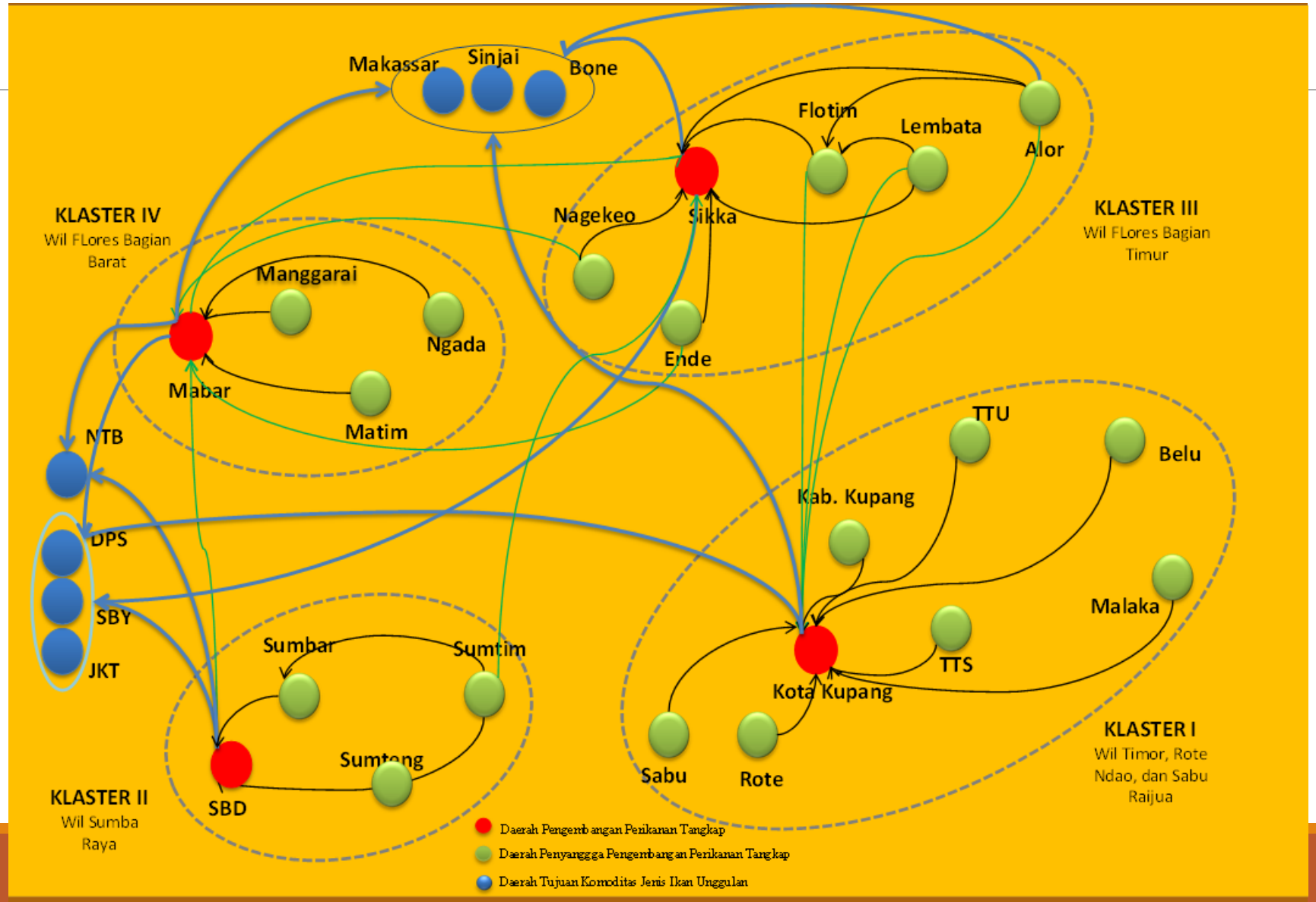

REGULASI PERIKANAN TUNA

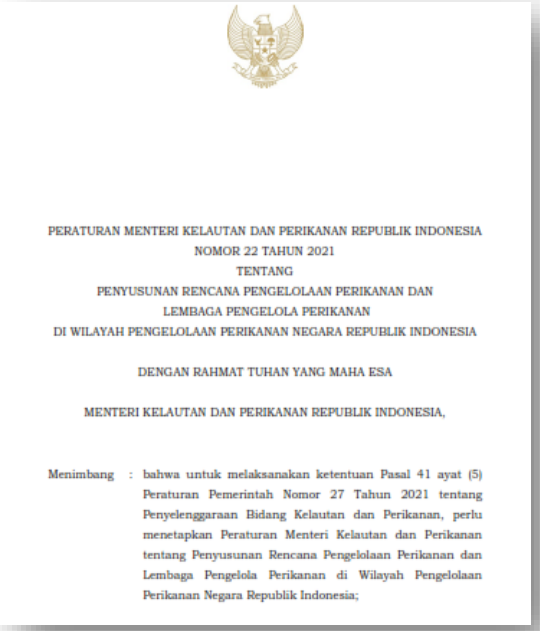

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN DAN
LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Cara dan Strategi Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan
- Penyusunan Lembaga Pengelola Perikanan
- Pengelolaan perikanan berkelanjutan

Permenkp Nomor 22 Tahun 2021

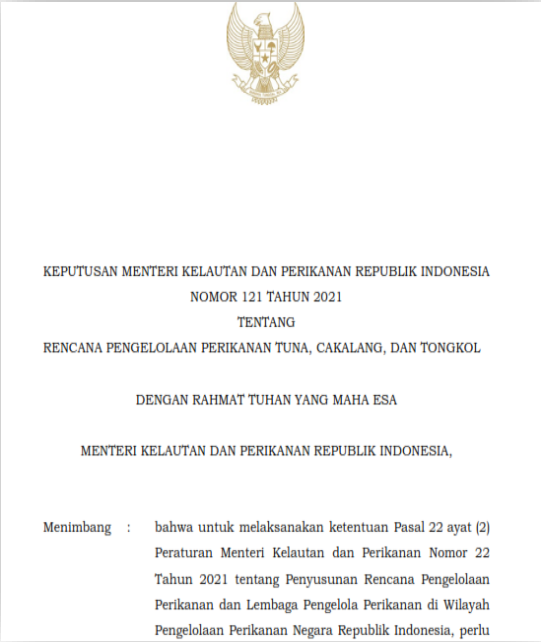

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN TUNA, CAKALANG, DAN TONGKOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perlu

- Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang dan Tongkol
- Pengelolaan tuna-cakalang di wilyah IOTC
- Pedoman bagi seluruh stakeholder terkait dengan pengelolaan TCT

Kepmenkp Nomor 121 Tahun 2021

REGULASI PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DI NTT

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

TATA NIAGA KOMODITAS HASIL PERIKANAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Kepastian Berusaha
- Penumbuhan Iklim Investasi di daerah
- Jaminan ketersediaan bahan baku
- Stabilitas harga
- Kepatuhan dalam berusaha di perairan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 167 /KEP/HK/2023

TENTANG

KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENUMBUHAN IKLIM INVESTASI

1. **Ketersediaan lokasi penangkapan dan industri**
2. **Produktivitas tinggi**
3. **Kemudahan dalam berinvestasi**
4. **Kerja kolaboratif**

KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN

HARAPAN TERHADAP IMPLEMENTASI BERSAMA MITRA

- **Rencana aksi harus selaras dengan Grand Design Pengembangan Kelautan dan Perikanan berbasis komoditas unggulan (tuna)**
- **Harus Dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat (nelayan dan pelaku usaha)**
- **Harus dapat mendukung kebijakan pemerintah provinsi NTT dengan berpikir Out of the box untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif**
- **Pengelolaan tuna harus terintegrasi Hulu - hilir**

TERIMA KASIH

Pendataan Perikanan Tuna Prov. Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 - 2023

Kupang, 12 Juli 2023

Konservasi Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari

Pendahuluan

- Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) adalah organisasi lingkungan nasional yang berbasis sains
- Telah bekerja di Wilayah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai tahun 2019
  - Kapal sebanyak 9 kapal pada tahun 2019
  - Kapal sebanyak 19 kapal pada tahun 2020
  - Kapal sebanyak 8 kapal mulai tahun 2022
- Data dikumpulkan untuk mendukung penyelesaian Harvest Strategy Tuna di WPP 713, 714 dan 715
- Penyerahan data ke tim sains Harvest Strategy Tuna dan eBRPL

Crew-Operated Data Recording System (CODRS)

CODRS adalah system pencatatan data perikanan yang merekam hasil tangkapan nelayan (berbasis foto), yang memiliki kemiripan dengan Elogbook penangkapan ikan.

CODRS dilakukan dengan berpartisipasi bersama nelayan.

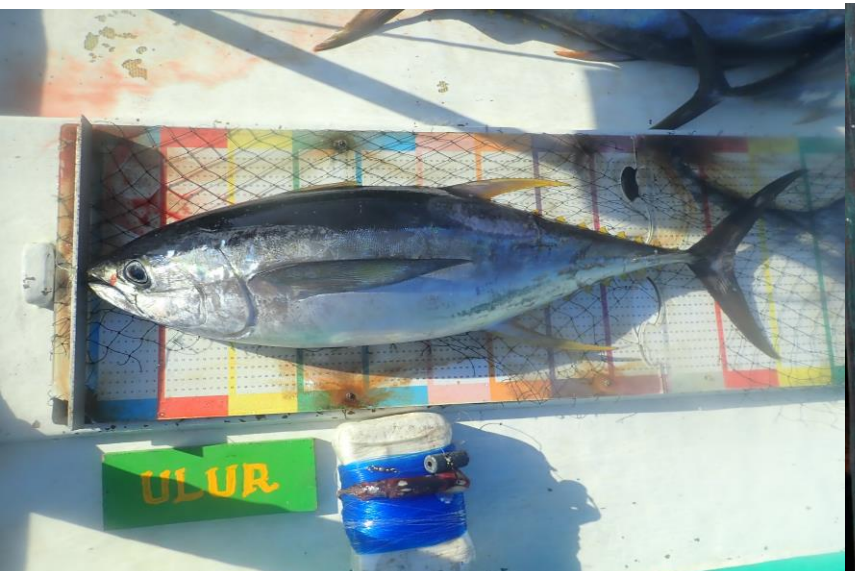

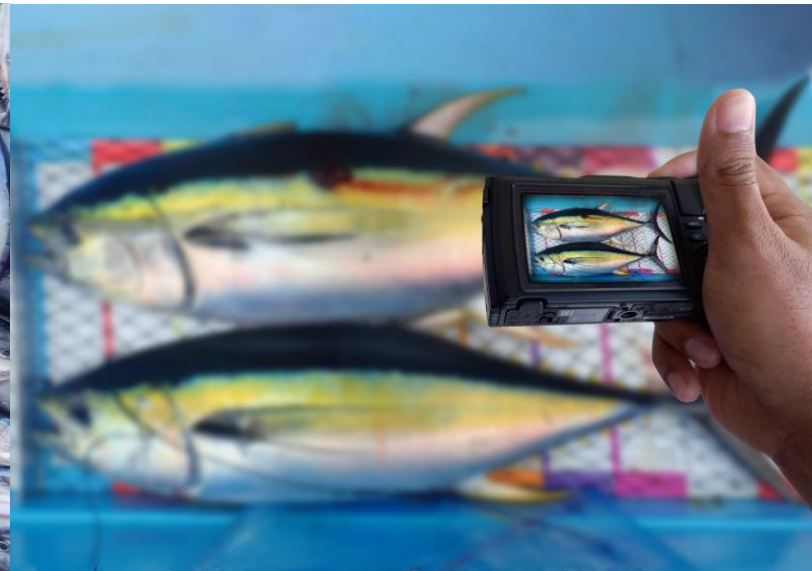

Cara Kerja CODRS

1 **Pelatihan intensif diberikan kepada 27 koordinator lapangan tentang metode pengambilan foto dan identifikasi spesies.**

- Koordinator lapangan membangun komunikasi dengan kapten dan kru, melakukan pelatihan CODRS kepada nelayan dan menerima media digital dengan gambar dari kapten setelah setiap perjalanan melaut.

2 **Lebih dari 700 nelayan telah diberikan pelatihan teknis mengenai jenis-jenis ikan dan pentingnya pencatatan data tangkapan ikan.**

- Untuk membantu perikanan kakap-kerapu laut dalam agar berkelanjutan.

3 **Koordinator lapangan memastikan hasil tangkapan difoto dengan kualitas terbaik dan membantu proses identifikasi foto.**

- Untuk menghasilkan daftar spesies dan panjang ikan yang jelas.

4 **Supervisor kemudian akan melakukan verifikasi dan kelayakan kualitas data dalam database *I-Fish*.**

- Untuk digunakan dalam analisis lanjutan.

5 **Koordinator lapangan lalu mengumpulkan nota hasil penjualan nelayan** dalam setiap perjalanan dan pendaratan ikan yang dilakukan.

6 **Informasi total berat ikan dan nilai penjualan dalam nota dapat memastikan apakah:**

a. nelayan telah mengambil gambar seluruh hasil tangkapan dengan baik, dan

b. memungkinkan peneliti untuk memahami tiap-tiap pendapatan secara akurat.

7 **Data yang diambil dari CODRS juga disampaikan ke pemerintah (KKP)** dan telah membantu KKP untuk membuat regulasi dan standarisasi perikanan.

Prinsip CODRS bersifat sukarela. Nelayan dapat mematikan sistem kapan pun mereka mau.

- Sebagai insentif kerja sama, YKAN memberikan kompensasi bulanan kepada kapten kapal untuk melakukan pendataan.
- Para nelayan juga mendapat *Badge of Honor* Nelayan Peduli sebagai bentuk apresiasi bahwa nelayan CODRS berarti nelayan yang peduli akan keberlanjutan perikanan di Indonesia.

Frame Survey 2017-2019

Lokasi Survey	Waktu Survey	Keterangan
PPI. Amagarapati	September 2017	Direkomendasikan dilakukan pendataan
Desa Kokar, Alor	Mei 2019	Direkomendasikan dilakukan pendataan
Desa Balauring, Lembata	Mei 2019	Direkomendasikan dilakukan pendataan
Desa Nangahure, Sikka	September 2019	Direkomendasikan dilakukan pendataan
PPI Alok, Sikka	November 2019	Direkomendasikan dilakukan pendataan

Kapal Mitra CODRS di Kabupaten Sikka

KMN Pahlawan Sejati 01

CODRS Deployment	Registration Port	Home District	GT Estimate	GT Declared	Boat Size Category	Fishing Gear	Fishing WPP
Februari 2021	PP ALok	Kabupaten Sikka	22.8	30	Medium	PoleAndLine	713

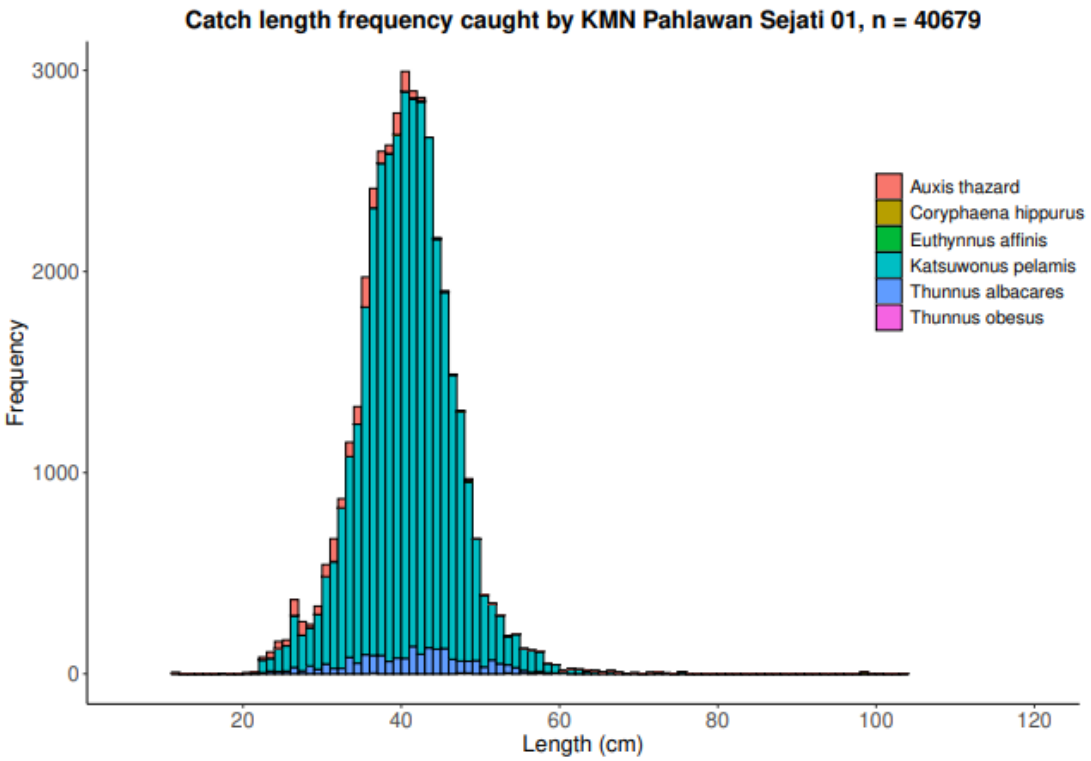

Kapal Mitra CODRS di Kabupaten Sikka

KMN. KCBS 15B

CODRS Deployment	Registration Port	Home District	GT Estimate	GT Declared	Boat Size Category	Fishing Gear	Fishing WPP
Februari 2022	PP ALok	Kabupaten Sikka	24.6	29	Medium	PoleAndLine	713

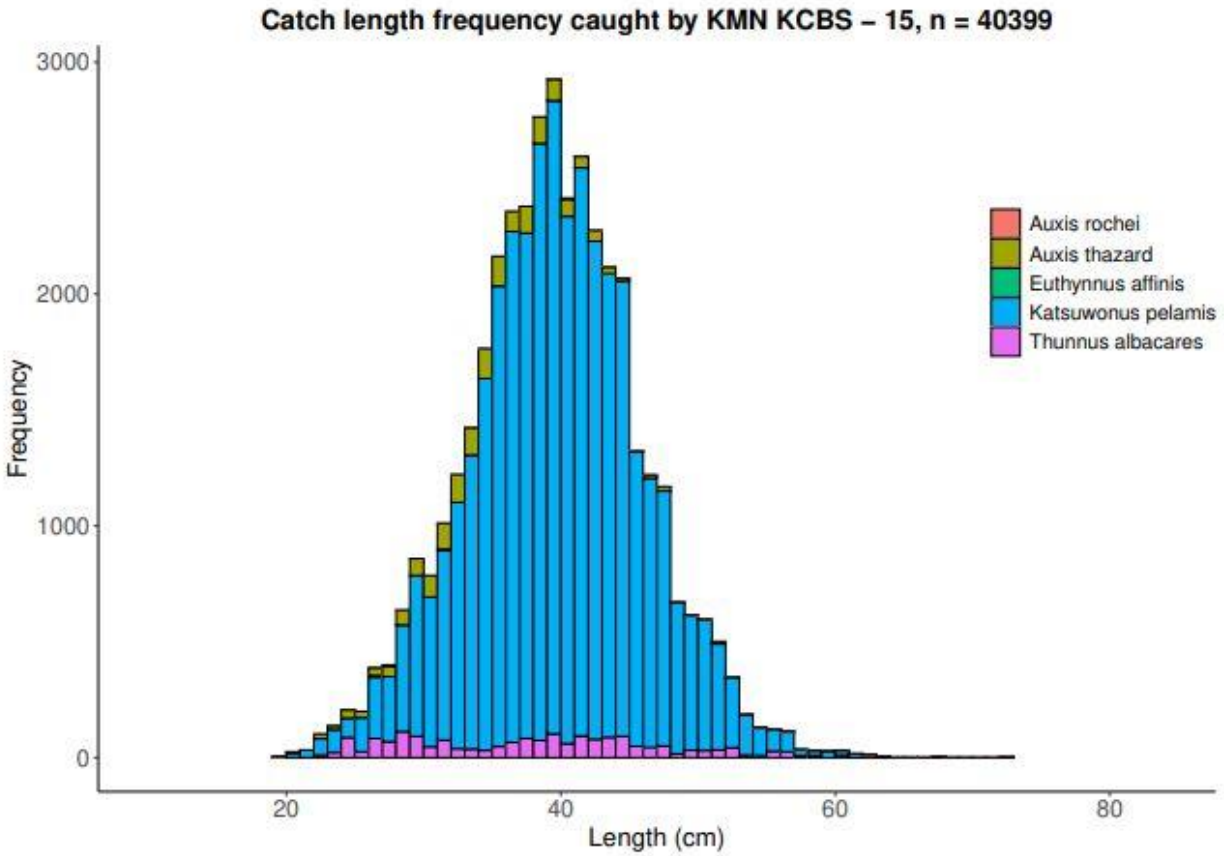

Kapal Mitra CODRS di Kabupaten Sikka

KMN. CINTA BAITULLAH

CODRS Deployment	Registration Port	Home District	GT Estimate	GT Declared	Boat Size Category	Fishing Gear	Fishing WPP
Agustus 2022	PP ALok	Kabupaten Sikka	25.51	30	Medium	PoleAndLine	713

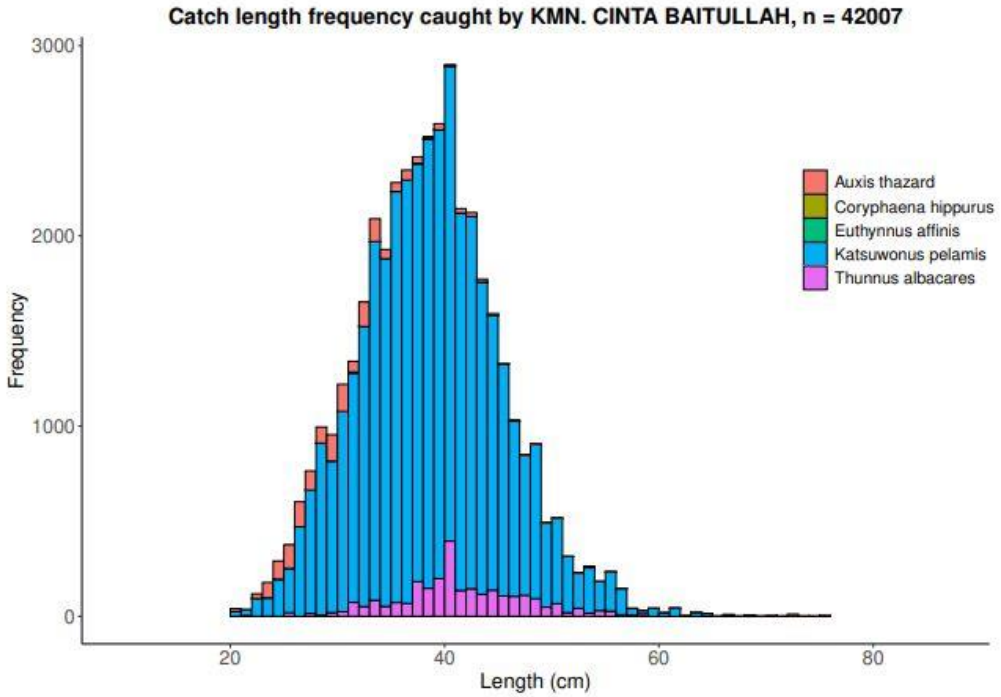

Kapal Mitra CODRS di Kabupaten Sikka

KMN. RATU ROSARI

CODRS Deployment	Registration Port	Home District	GT Estimate	GT Declared	Boat Size Category	Fishing Gear	Fishing WPP
Agustus 2022	PP ALok	Kabupaten Sikka	6.83	6	Medium	Purse Seine	713

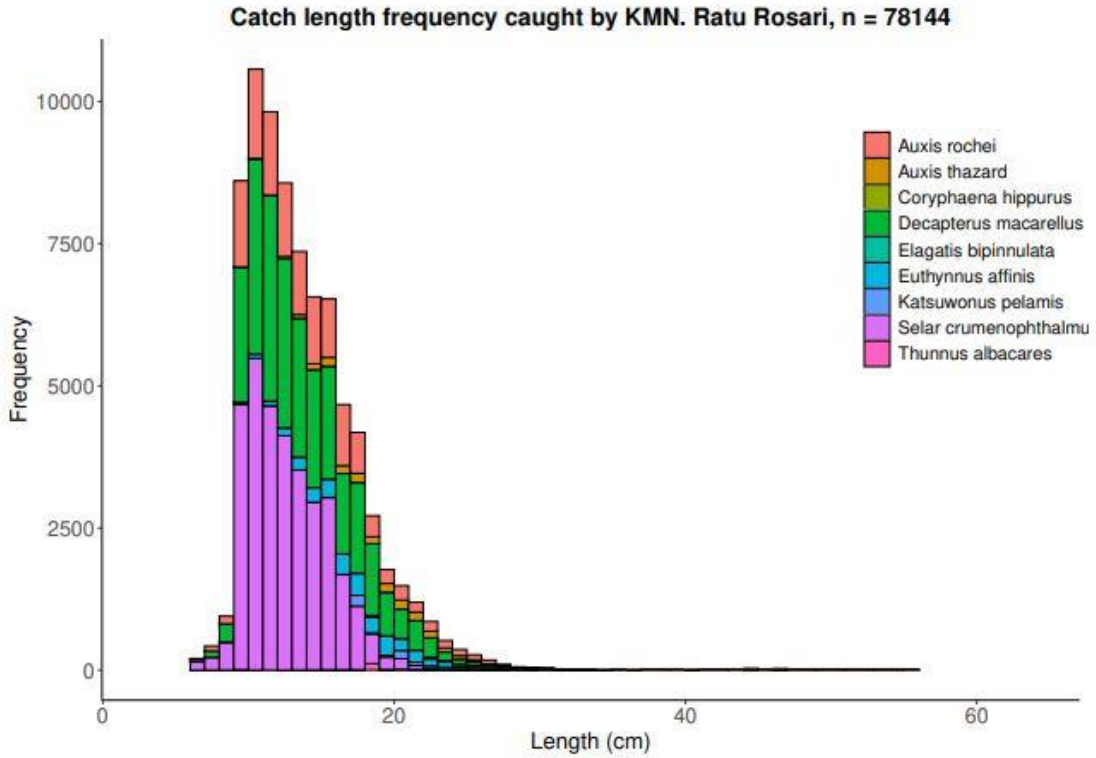

Kapal Mitra CODRS NTT

KMN. BERKAH MADINA

CODRS Deployment	Registration Port	Home District	GT Estimate	GT Declared	Boat Size Category	Fishing Gear	Fishing WPP
Agustus 2022	PP ALok	Kabupaten Sikka	6.14	6	Small	Purse Seine	713

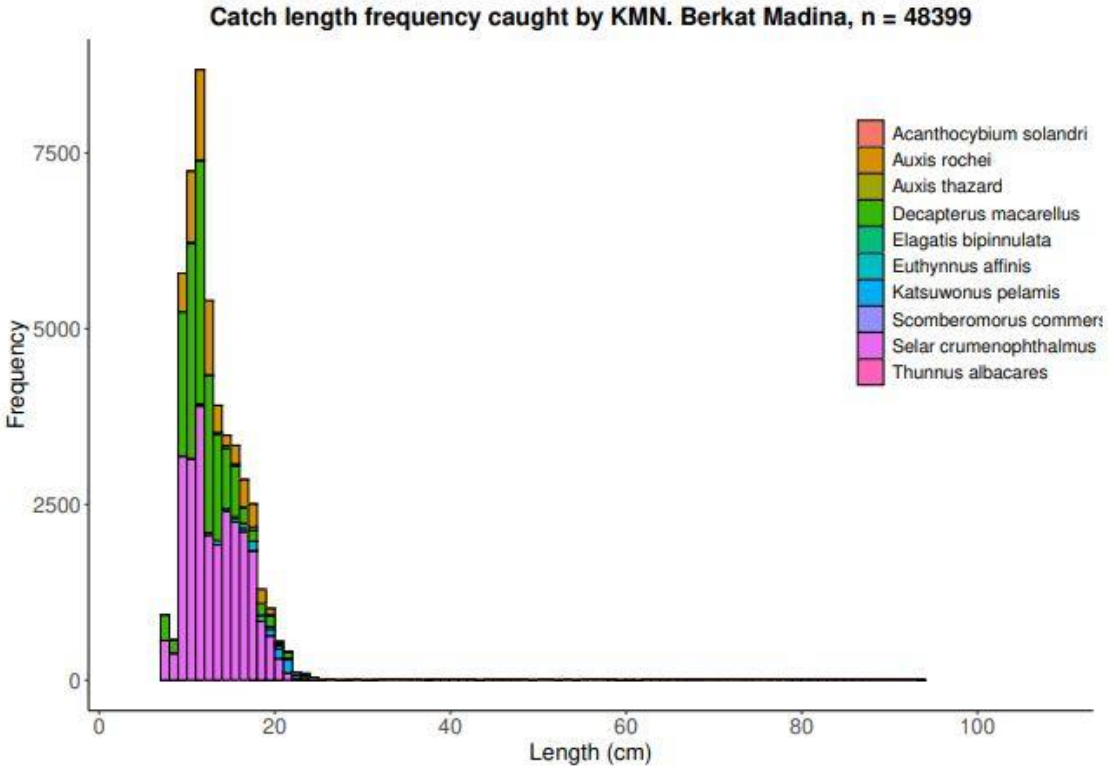

Kapal Mitra CODRS di Kabupaten Sikka

KMN. GADIS MANJA

CODRS Deployment	Registration Port	Home District	GT Estimate	GT Declared	Boat Size Category	Fishing Gear	Fishing WPP
March 2021	Desa Nangahure	Kabupaten Sikka	2.3	2	Nano	Handline	713

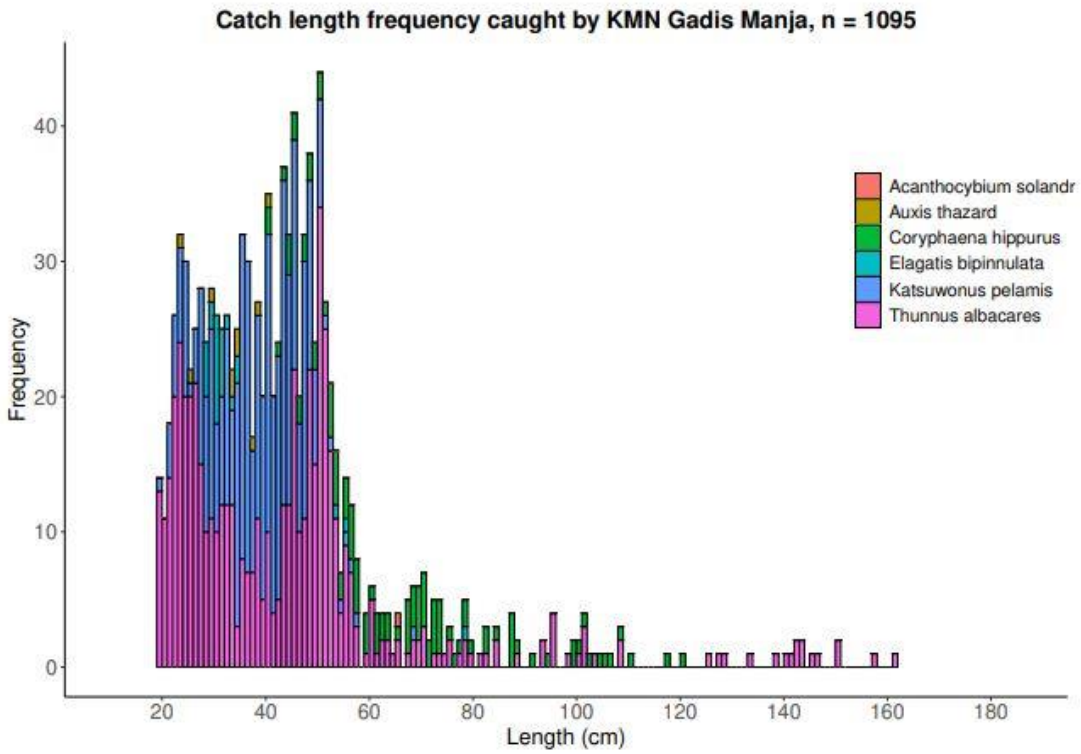

Kapal Mitra CODRS di Kabupaten Sikka

KMN. AMISTA

CODRS Deployment	Registration Port	Home District	GT Estimate	GT Declared	Boat Size Category	Fishing Gear	Fishing WPP
March 2021	Desa Nangahure	Kabupaten Sikka	1.6	4	Nano	Handline	713

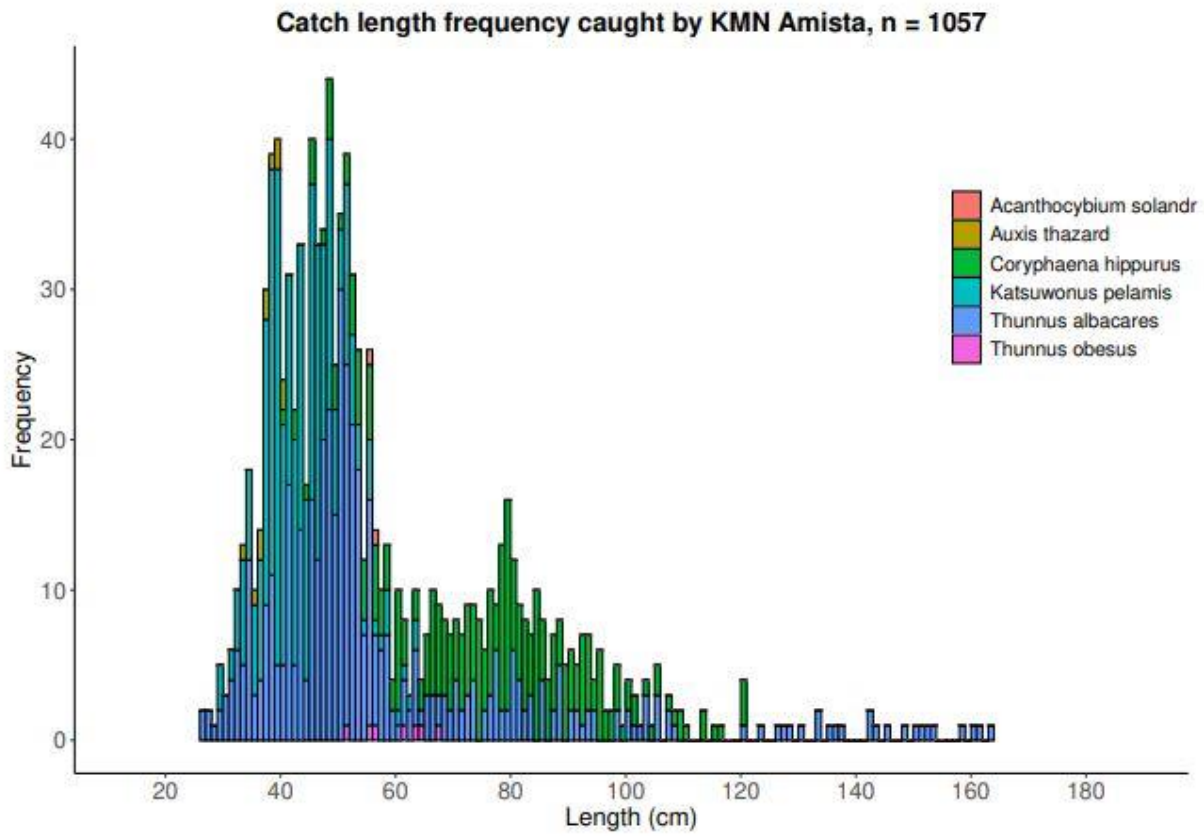

Kapal Mitra CODRS di Kabupaten Sikka

KMN. TIGA PUTRI 02

CODRS Deployment	Registration Port	Home District	GT Estimate	GT Declared	Boat Size Category	Fishing Gear	Fishing WPP
March 2021	Desa Nangahure	Kabupaten Sikka	2.2	2	Nano	Handline	713

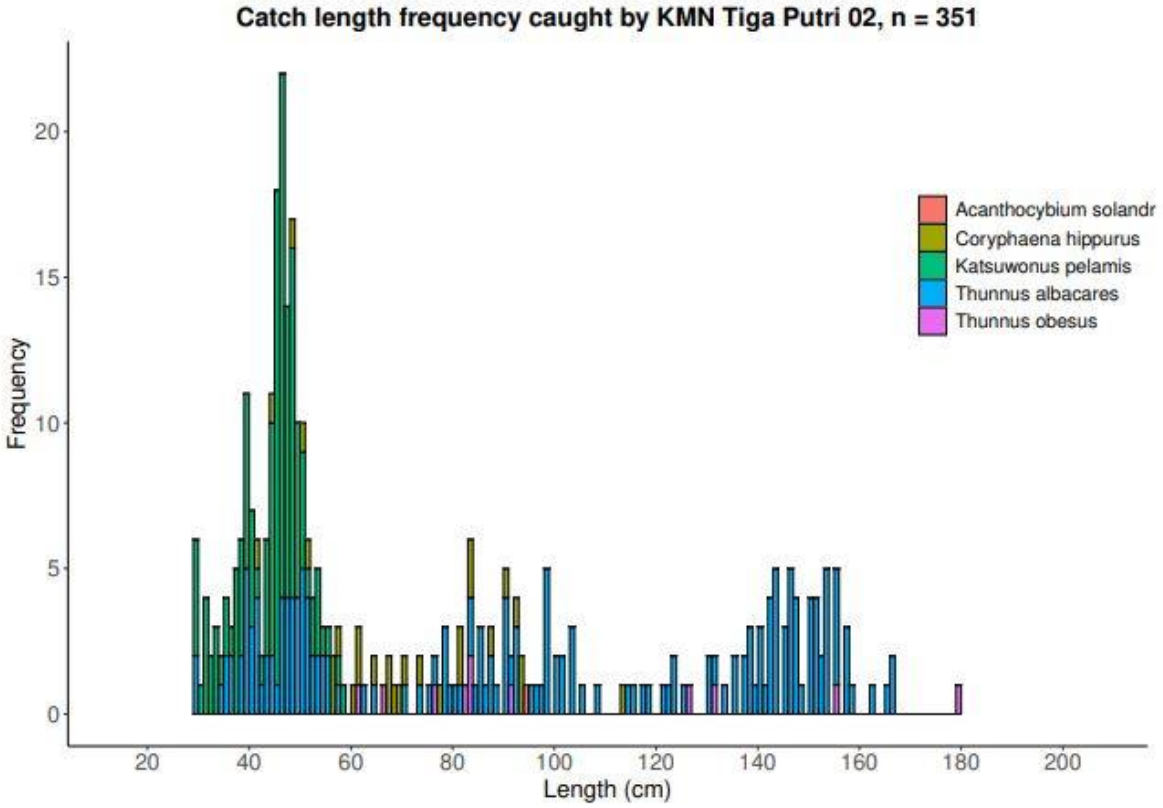

Data Spottrace Kapal Kabupaten Sikka

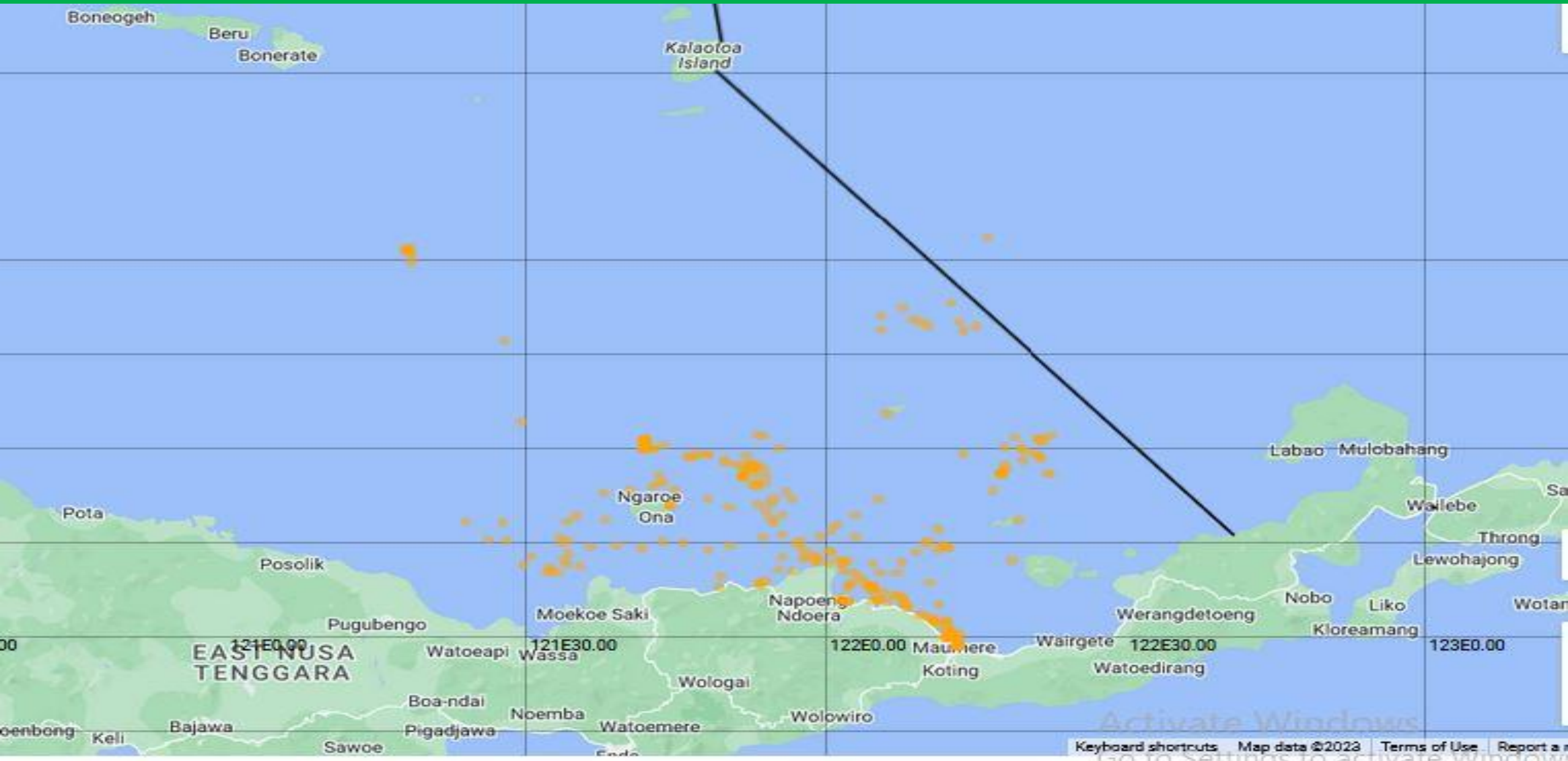

Foto Hasil Tangkapan Kapal Mitra CODRS Kabupaten Sikka

Kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kegiatan	Waktu	Keterangan
Kontrak 2 kapal Purse Seine	Agustus 2022 – Agusutus 2023	Sudah dilakukan kontrak 2 kapal purse seine di Wuring
Kontrak kapal pole and line dan Hand Line	Agustus 2022 – Agustus 2023	Sudah dilakukan kontrak 3 kapal pole And line dan 3 Kapal Handline
Kuesioner Management Measurement	September 2022	Sudah dilakukan dengan DKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 3 responden (Kabid Tangkap, Data bid. Tangkap dan PPI Oeba)

TERIMA KASIH

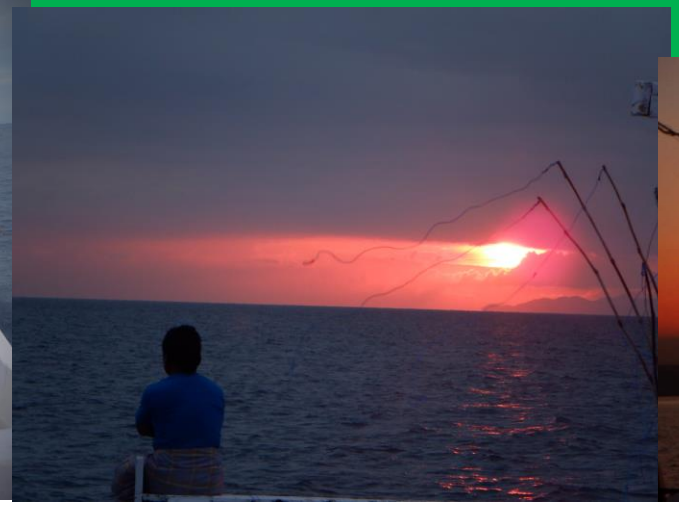

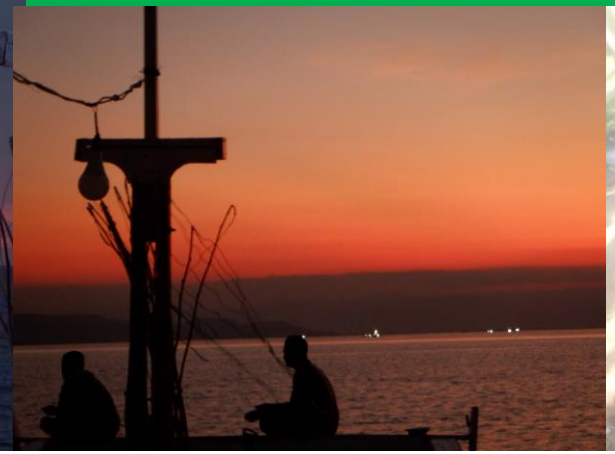

Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari

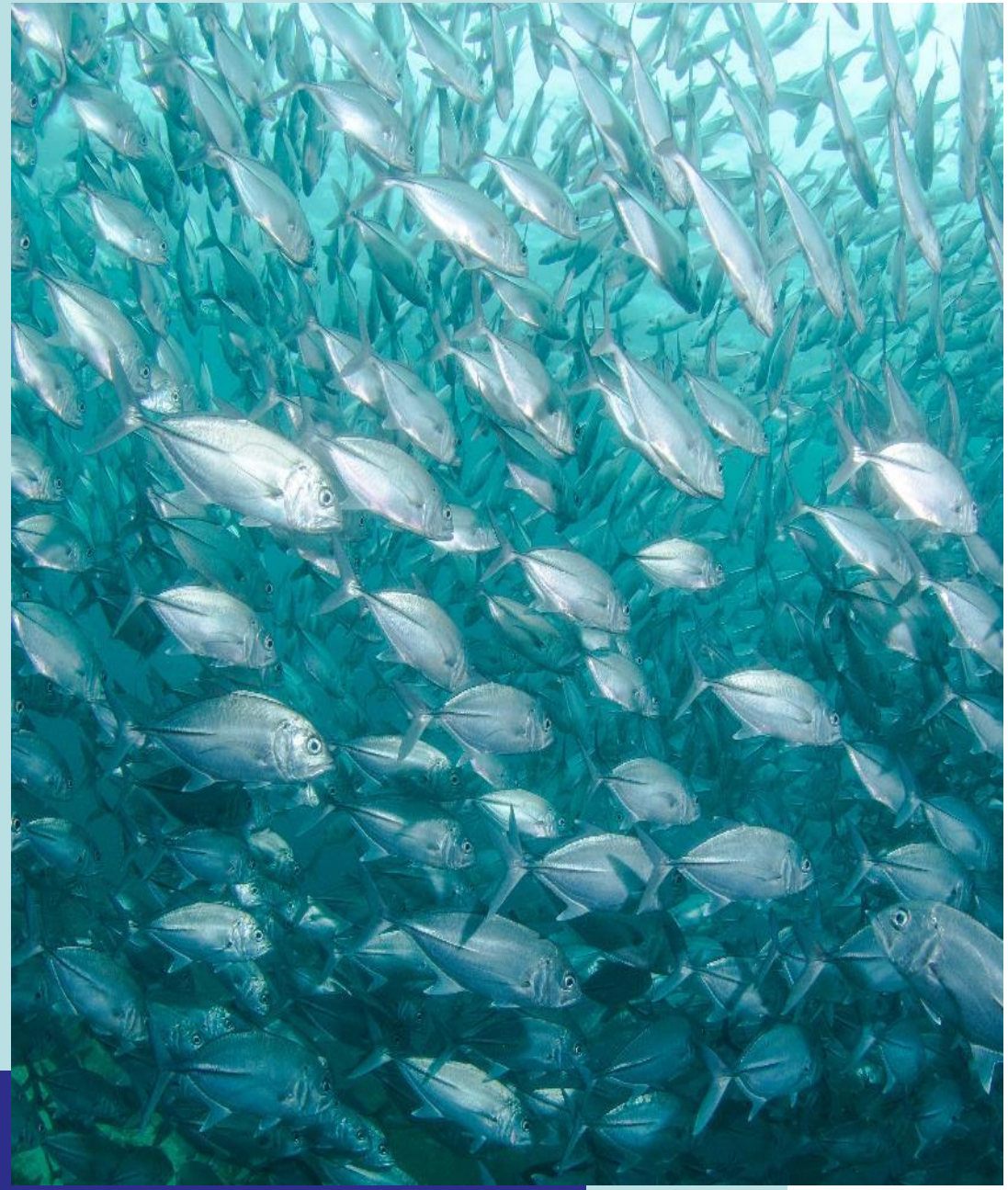

PENTINGNYA PENGELOLAAN BERSAMA PERIKANAN DAN SINERGI PROGRAM KELEMBAGAAN DITINGKAT PUSAT DAN DAERAH, MELALUI LPPWPPNRI DAN KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN (KPBP) PROVINSI NTT

Aris Budiarto
Ketua Pokja Analisis Pengelolaan SDI

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
NTT, 12 Juli 2023

AMANAT RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN

- UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009 dan diperbaharui lagi dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni bahwa Pemerintah Pusat menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Perikanan (RPP) sebagai arahan dan pedoman bagi Pemerintah, Pemda, dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan di WPPNRI Pasal 7 ayat 1 huruf (a).

- Peraturan Pemerintah (PP) No.27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Pasal 41 ayat 1, yakni

1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, Pemerintah menetapkan RPP.

.”

URGENSI PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DI WPPNRI

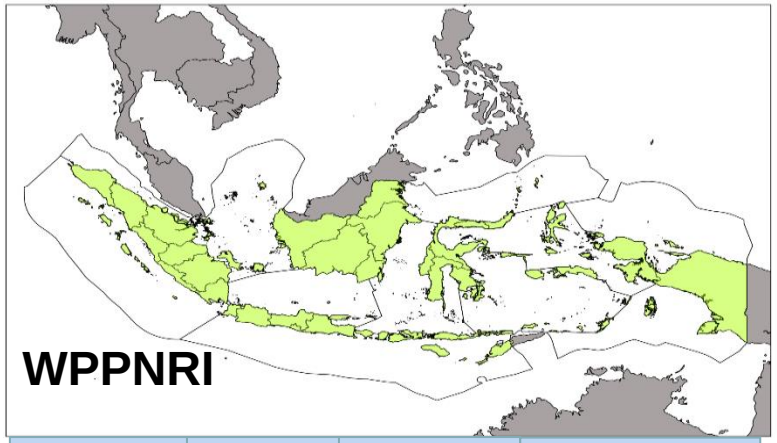

Multi-species	Multi-gears	Multi-habitat	Multi-stakeholders

Potensi Perikanan

Estimasi Potensi, JTB, dan Tingkat Pemanfaatan Perikanan yang berbeda-beda di setiap WPP

Tata Kelola

Diperlukan Tata Kelola Perikanan yang Komprehensif dirancang sesuai dengan skala yang tepat dan sesuai dengan karakteristik perikanan di setiap WPPNRI

RPP

RPP merupakan acuan bagi stakeholders dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI. RPP disusun dari aspirasi semua stakeholders sesuai perannya masing-masing

Wadah

LPP WPPNRI sebagai wadah koordinasi & sinergi bagi stakeholders untuk meningkatkan efisiensi, optimalisasi, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan di WPPNRI.

ATP Arah Tindakan Pengelolaan

Rekomendari Arah Tindakan Pengelolaan di setiap WPPNRI mulai dari Hulu-hilir, Pusat dan Daerah sebagai implementasi pengelolaan perikanan Berbasis WPPNRI

RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN (RPP)

Rencana Pengelolaan Perikanan berbasis WPPNRI

WPPNRI	No. Kepmen KP	Kelompok Jenis Ikan Prioritas yang dikelola				Status Dokumen
571	Kepmen KP No. 75/KEPMEN-KP/2016	udang	pelagis kecil	-		
572	Kepmen KP No. 76/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal		
573	Kepmen KP No. 77/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal		Proses Reviu
711	Kepmen KP No. 78/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal		
712	Kepmen KP No. 79/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal		Proses Reviu
713	Kepmen KP No. 80/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal	ikan karang	Proses Reviu
714	Kepmen KP No. 81/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal		Proses Reviu
715	Kepmen KP No. 82/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal	ikan karang	Proses Reviu
716	Kepmen KP No. 83/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal	-	
717	Kepmen KP No. 84/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal	-	Proses Reviu
718	Kepmen KP No. 54/KEPMEN-KP/2014	udang	-	demersal		Proses Reviu

RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN (RPP)

Rencana Pengelolaan Perikanan berbasis Jenis Ikan

Jenis Ikan	No. Kepmen KP	Lokasi WPPNRI											Status Dokumen	Jenis
		571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718		
Rajungan	Kepmen KP No. 83 Tahun 2022				✓	✓	✓							
Lemuru	Kepmen KP No. 68/KEPMEN-KP/2016			✓			✓						Proses Reviu	
Ikan Terbang	Kepmen KP No. 69/KEPMEN-KP/2016						✓		✓			✓	Proses Reviu	
Sidat	Kepmen KP No. 118 Tahun 2021													Anguilla bicolor dan Anguilla marmorata
TCT	Kepmen KP No. 121 Tahun 2021		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
Kakap dan Kerapu	Kepmen KP No. 123 Tahun 2021			✓	✓	✓	✓			✓		✓		
Lobster													Sedang disusun	
Kepiting Bakau		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sedang disusun	
Gurita													Sedang disusun	

MONITORING DAN EVALUASI RPP

Monitoring dan evaluasi Rencana Pengelolaan Perikanan dilakukan minimal 2 (dua) tahun sekali melalui LPP WPPNRI. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan melalui *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM)

SMARTER

Specific	Spesifik
Measurable	Dapat diukur
Achieveable	Dapat dilakukan
Relevant	Relevan
Time Bound	Ada batas waktu
Evaluated	Dapat dievaluasi
Reviewed	Dapat direview

Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan antara lain yaitu

1. input yang dibutuhkan terkait dana, SDM, fasilitas dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
2. pencapain sasaran;
3. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan;
4. Identifikasi permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan rencana aksi pengelolaan.\
5. Rekomendasi tindakan pengelolaan lainnya yang dianggap perlu dan relevant.

LEMBAGA PENGELOLAAN PERIKANAN (LPP) WPPNRI

- LPP WPP merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- LPP WPP dipimpin oleh Kepala yang dijabat oleh Direktur Jenderal.
- LPP WPP mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPP-NRI.

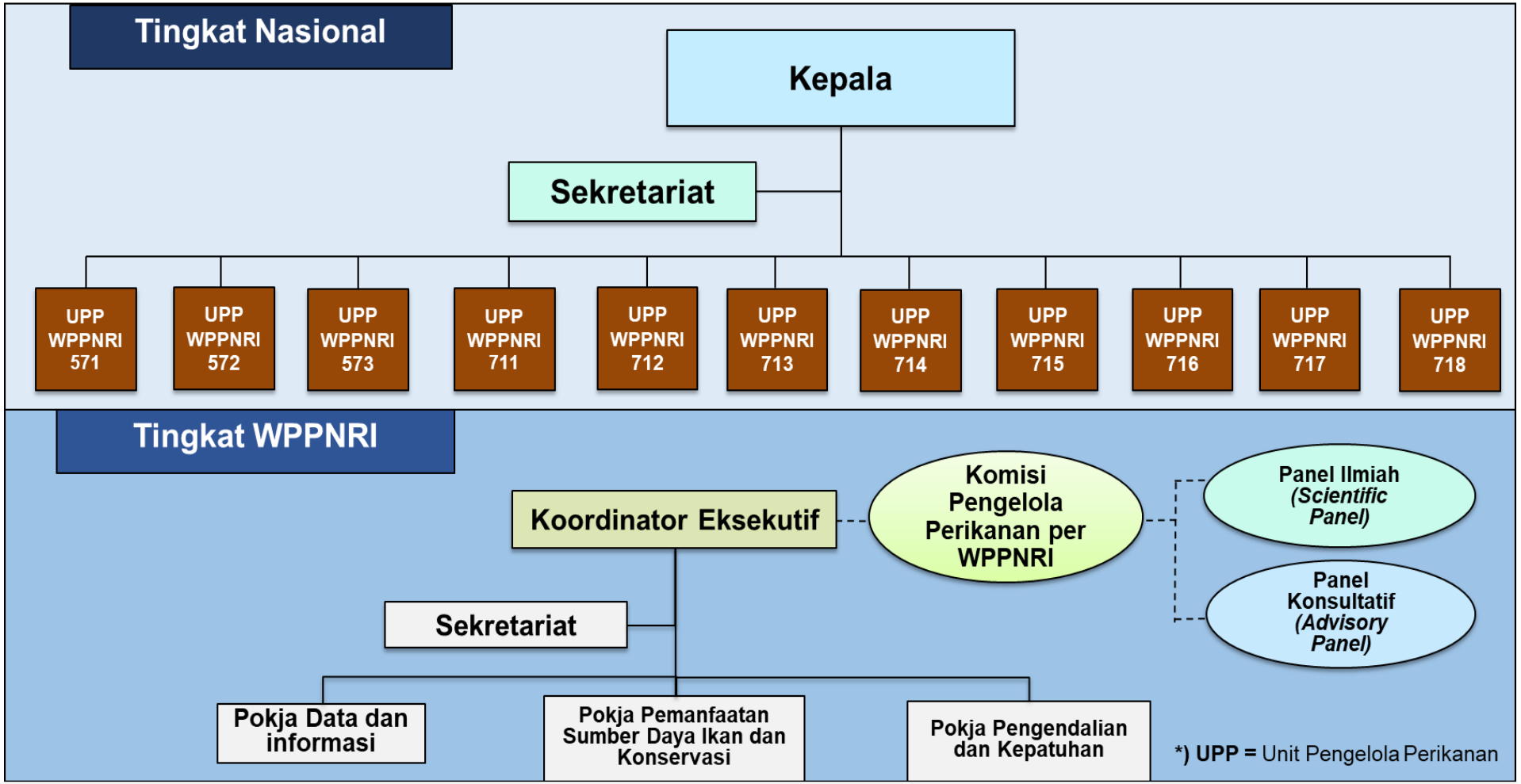

- Perencanaan dalam menyusun rekomendasi kebijakan melibatkan semua *stakeholders*
- Pelibatan semua stakeholder dalam Proses Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan, Harvest Strategy, kuota dll

TUGAS, FUNGSI, DAN SDM UPP WPPNRI

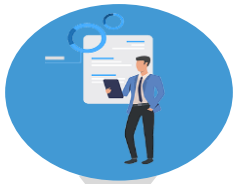

Koordinator Eksekutif

Pemimpin unit pengelola perikanan di setiap WPPNRI yang bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI

Sekretariat UPP

Melakukan kegiatan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas UPP.

Pokja Data dan Informasi

Koordinasi kerja sama pelaksanaan RPP, serta pengumpulan, analisis, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pelaksanaan RPP.

Pokja Pemanfaatan SDI dan Konservasi

Koordinasi analisis serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan konservasi untuk merekomendasikan tindakan Pengelolaan Perikanan.

Pokja Pengendalian dan Kepatuhan

Koordinasi analisis, pemantauan, serta pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

TUGAS, FUNGSI, DAN SDM UPP WPPNRI

Komisi Pengelola Perikanan

Perumusan masukan pelaksanaan dan evaluasi RPP, serta kebijakan pengelolaan di WPPNRI

(3) Komisi Pengelola Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:

a. Dinas provinsi dan/atau Dinas kabupaten/kota di WPPNRI terkait;

b. unit kerja eselon II terkait pada unit kerja eselon I lingkup Kementerian; dan/atau

c. unit pelaksana teknis pelabuhan Perikanan pusat di WPPNRI terkait.

(4) Komisi Pengelola Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dikoordinasikan oleh koordinator.

(5) Masa kerja koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di masing-masing UPP paling lama 2 (dua) tahun.

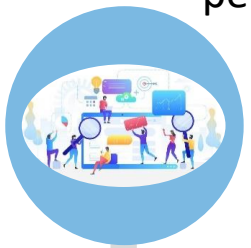

Panel Ilmiah

Memberi masukan ilmiah berdasarkan kajian ilmiah, hasil penelitian, dan/atau ilmu pengetahuan.

(2) Panel Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:

a. lembaga penelitian di bidang kelautan dan Perikanan;

b. perguruan tinggi;

c. kelompok ilmiah Pengelolaan Perikanan; dan

d. pakar/ahli kelautan dan Perikanan.

Panel Konsultatif

Berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi sebagai Wakil Pemangku Kepentingan terkait kebijakan yang akan disusun.

(2) Panel Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

a. asosiasi di bidang kelautan dan Perikanan;

b. lembaga adat; dan

c. lembaga swadaya masyarakat.

MEKANISME KERJA LPP WPPNRI

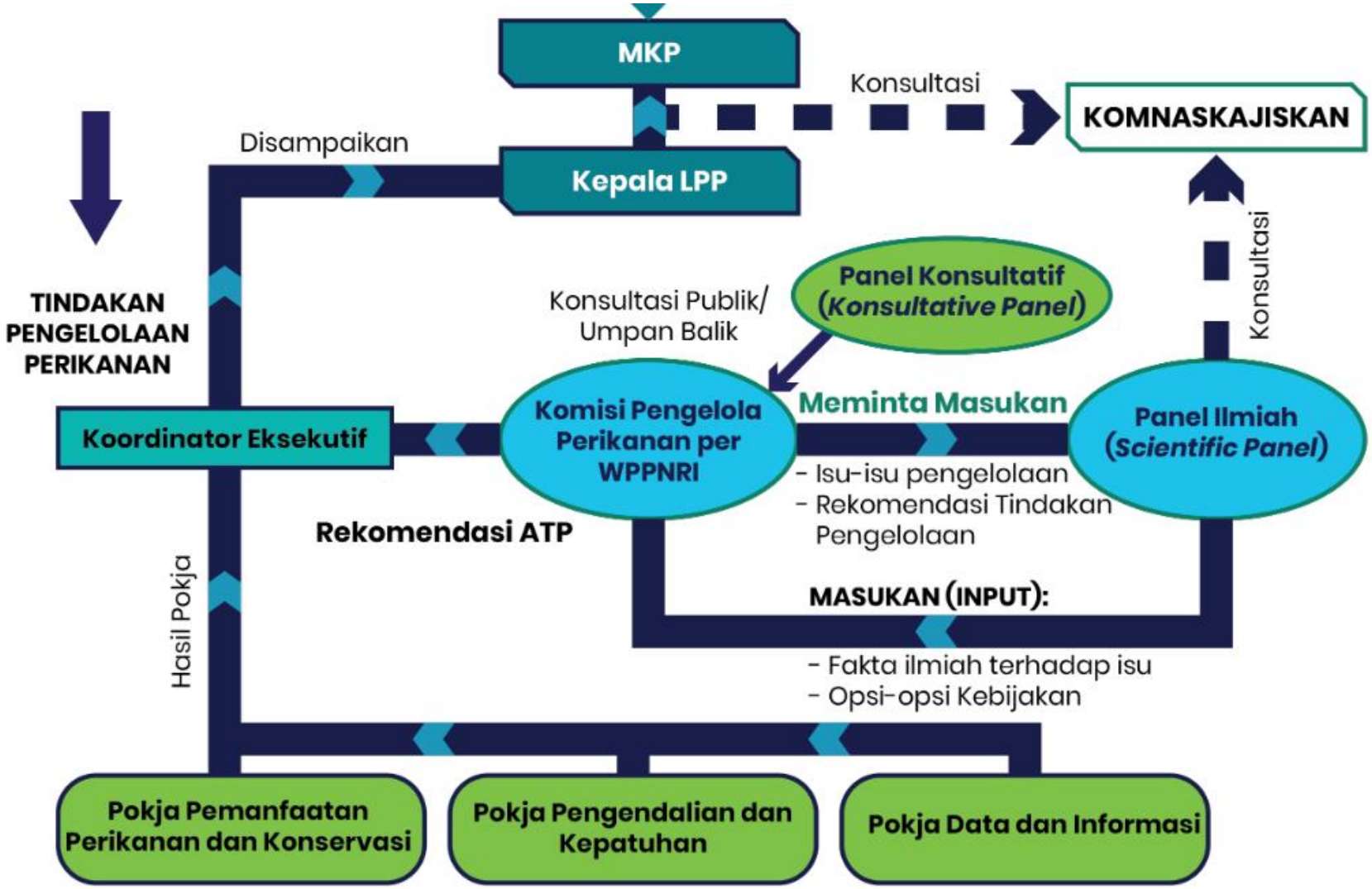

KALENDER LPP WPPNRI

Koordinasi	Frekuensi	Keterangan
Koordinasi Tingkat Komisi	setiap semester	Perumusan masukan pelaksanaan dan evaluasi RPP, serta kebijakan pengelolaan di WPPNRI
Koordinasi Panel Konsultatif	setiap semester	Berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi sebagai Wakil Pemangku Kepentingan terkait kebijakan yang akan disusun.
Koordinasi Panel Ilmiah	setiap semester	Memberi masukan ilmiah berdasarkan kajian ilmiah, hasil penelitian, dan/atau ilmu pengetahuan.
Koordinasi POKJA-POKJA	setiap triwulan	Koordinasi kerja terkait data dan informasi, pemanfaatan SDI dan Konservasi, serta pengendalian dan kepatuhan
Koordinasi Tingkat Nasional	1 tahun sekali	Koordinasi 11 WPPNRI di tingkat nasional

MEKANISME KERJA LPP WPPNRI

1. Pengaturan masukan (**input control**) : pengaturan terkait dengan masukan ke perikanan, seperti jumlah kapal/jumlah GT/nelayan yang melakukan penangkapan;
2. Pengaturan keluaran (**output control**) : pengaturan terkait dengan keluaran dari perikanan, seperti jumlah/berat ikan yang tertangkap.
3. Pengaturan teknis (**technical control**) : pengaturan alat tangkap : mata jaring, penggunaan alat pemisah ikan, dsb.
4. Pengaturan area & waktu **(spasial-temporal)**: penutupan daerah memijah, musim memijah, dsb.

Dalam praktek pengelolaan perikanan input/output control sering digabung dengan kontrol teknis dan/atau kontrol spasial-temporal lainnya.

PELUANG DAN TANTANGAN

Peluang

- Potensi Sumber daya ikan yang berpotensi (secara ekonomi) terkelola;
- Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI di 11 WPPNRI dan Jenis Ikan
- Alokasi / kuota SDI ditetapkan, dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi;
- Organisasi dan Tata Kerja LPP WPPNRI sudah ditetapkan;
- Pertemuan Rutin LPP WPPNRI di tiap WPPNRI sudah dilaksanakan dan dianggarkan
- Pusat Informasi Pengelolaan Perikanan WPPNRI (PIN WPP) https://integrasi.djpt.kkp.go.id/pinwpp

Tantangan

- Otonomi daerah
- Pemahaman bersama terkait pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI
- SDM Pengelola Perikanan di masing-masing WPPNRI
- Ketersediaan database perikanan yang akurat, komprehensif, real time, dan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan tindakan pengelolaan di masing – masing WPPNRI;
- Mengintegrasikan program seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah

DUKUNGAN DAN SINERGI LINTAS SEKTOR

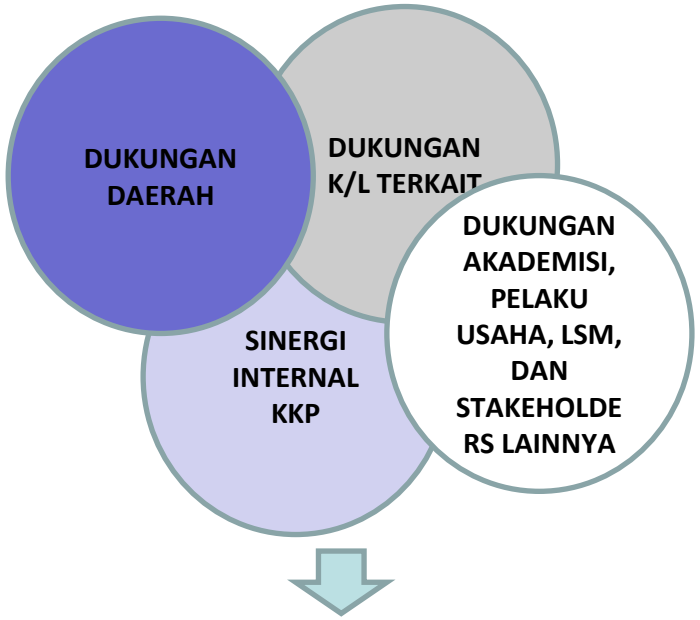

1. Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang maju dan berkelanjutan
2. Dukungan infrastuktur, sarana dan prasarana
3. Dukungan tata ruang
4. Dukungan aktivitas ekonomi lainnya

KEMENTERIAN/LEMBAGA (K/L)

KEMENKOMARVES
Koordinasi dan sinergi antar K/L dan daerah serta peningkatan investasi

BAPPENAS & KEMENKEU
Perencanaan dan pembiayaan

KEMENPUPR
Dukungan pengembangan infrastuktur

KEMENHUB
Dukungan sarana prasarana perhubungan

KEMENDES
Pengembangan kawasan desa pesisir

KEMEN-ATR
Sinkronisasi rencana tata ruang

BKPM
Peningkatan investasi

PEMDA

- Partisipasi pada kelembagaan WPP
- Penyiapan Lahan dan kesesuaian RTRW dan RZWP3K
- Identifikasi permasalahan di daerah
- Sinergi pembiayaan kegiatan prioritas nasional di daerah
- Menggalang dukungan pembangunan di daerah
- Integrasi program pusat-daerah
- Pendataan perikanan sesuai kewenangannya

SWASTA | **BUMN/D**
PELAKU USAHA | **STAKEHOLDERS LAINNYA**

RENCANA TINDAK LANJUT LPP WPPNRI

1. LPP WPPNRI diharapkan sebagai wadah dalam mensosialisasikan, mengimplementasikan, dan monitoring-evaluasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) kepada Pemerintah Provinsi, Pelabuhan Perikanan, dan para pemangku kepentingan lainnya di masing-masing WPPNRI;
2. LPP WPPNRI diharapkan menjadi wadah untuk mensosialisasikan, mengimplementasikan, dan monitoring-evaluasi kuota penangkapan ikan untuk industri, nelayan lokal, hobi, kepada Pemerintah Provinsi dan seluruh pemangku kepentingan di masing-masing WPPNRI;
3. Revitalisai LPP WPPNRI dengan mengoptimalkan mekanisme kerja LPP WPPNRI agar menjadi optimal dan lebih efektif;
4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap diharapkan untuk dapat melaksanakan amanat Permen KP No. 22 Tahun 2021 Pasal 47 terkait pembaharuan keanggotaan LPP WPPNRI melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap khususnya untuk Panel Ilmiah dan Panel Konsultatif di masing-masing WPPNRI;
5. Mendorong pembentukan komite/forum di tingkat provinsi

MEKANISME KERJA KOMITE PENGELOLA PERIKANAN TINGKAT PROVINSI

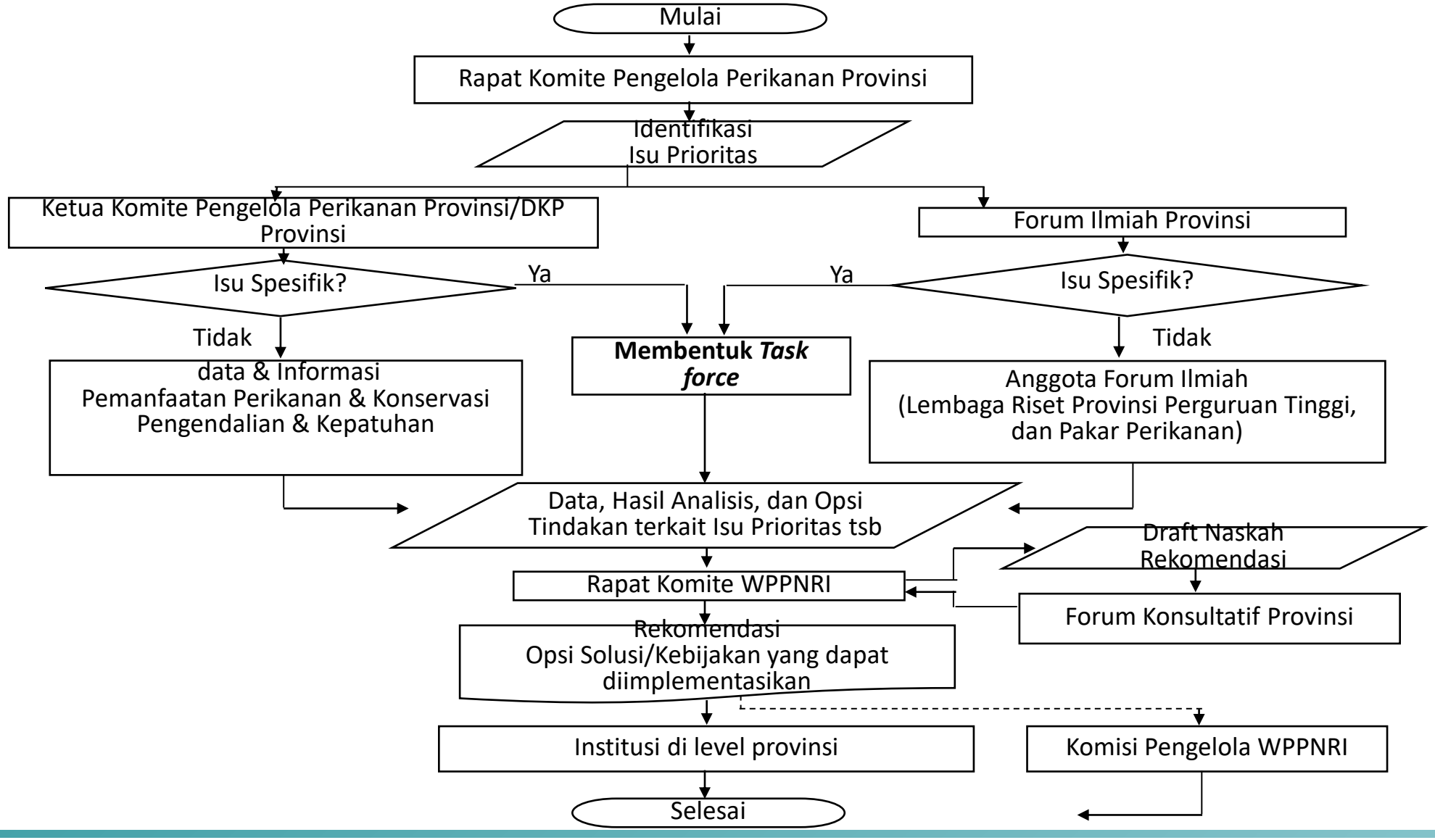

Terima kasih

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
© 2023